

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BIDANG PEMBANGUNAN DI
KAMPUNG SENGKEMANG KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN
SIAK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



RIA ANDRIYANI
NPM : 187110022

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Ria Andriyani
NPM : 187110022
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul skripsi : Pengelolaan Keuangan Desa Bidang Pembangunan
di Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib
Kabupaten Siak

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk di uji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Turut Menyetujui

Program Studi Administrasi Publik
Ketua

Pembimbing

Lilis Suriani., S.Sos., M.Si

Dr. Dia Meirina Suri S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ria Andriyani
NPM : 187110022
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Pengelolaan Keuangan Desa Bidang Pembangunan Di
Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib
Kabupaten Siak

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 29 Maret 2022

Ketua,



Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si

Sekretaris,



Kartius, S.Sos., M.Si

Anggota



Drs. Parjiyana, M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0185/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** :
1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ria Andriyani
N P M : 187110022
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengelolaan Keuangan Desa Bidang Pembangunan Di Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

Struktur Tim :

1. Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Kartius, S.Sos., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Drs. Parjiyana, M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Lolita Vianda, S.Sos, M.Pd Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Maret 2022

Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK: 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

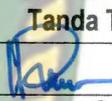
=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0185/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 28 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Selasa tanggal, 29 Maret 2022 jam 14.30 – 15.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ria Andriyani
NPM : 187110022
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pengelolaan Keuangan Desa Bidang Pembangunan Di Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak**

Nilai Ujian : Angka : "82.67" ; Huruf : "A-"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|------------------------------------|------------|--|
| 1. | Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si | Ketua | 1.  |
| 2. | Kartius, S.Sos., M.Si. | Sekretaris | 2.  |
| 3. | Drs. Parjiyana, M.Si | Anggota | 3.  |
| 4. | Lolita Vianda, S.Sos, M.Pd | Notulen | 4.  |

Pekanbaru, 29 Maret 2022

An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

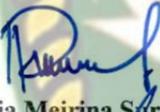
Nama : Ria Andriyani
NPM : 187110022
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengelolaan Keuangan Desa Bidang Pembangunan Di
Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten
Siak

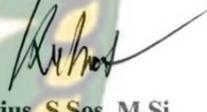
Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 29 Maret 2022

Ketua,

An. Tim Penguji
Sekretaris,


Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos, M.Si


Kartius, S.Sos, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi


Indra Safri, S.Sos, M.Si


Lilis Suriani, S.Sos, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Bidang Program Pembangunan di Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak”. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau.

Dalam usaha untuk menyelesaikan penulisan penelitian penulis telah banyak memberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Univesitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas. Islam Riau khususnya jurusan Administrasi Publik.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si Sebagai dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas islam riau.
3. Ibu Lilis Suriani S.Sos., M.Si Sebagai ketua program studi administrasi publik yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis untuk menyelesaikan usulan penelitian ini.
4. Dr. Dia Meirina Suri S.Sos., M.Si sebagai pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan dengan sabar dan memberikan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan penulisan usulan penelitian ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan usulan penelitian ini.
6. Teristimewa kepada keluarga tercinta Bapak saya bapak Usman dan juga kepada Mamak tercinta ibu Idawati dan juga untuk kedua abang Suprianto dan Rian Hidayat yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan semangat serta bantuan untuk penyelesaian penulisan usulan penelitian ini.
7. Kepada kedua kakak ipar saya tercinta Dadar Puji Utari dan Azura Andani yang sangat berkontribusi dan ikut andil dalam mensupport saya.
8. Kepada perangkat di Kampung Sengkemang yang telah bersedia memberikan waktunya dalam tujuan penyelesaian usulan penelitian ini.

9. Kepada sahabat saya yang selalu ada dalam keadaan apapun Sepni Nasar Wintia S.AP dan Indah Irawati S.AP yang selalu menemani penulis serta memberi support yang tiada hentinya
10. Kepada mantan saya, ini adalah pembuktian bahwa aku baik baik saja tanpa kamu.
11. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2018 administrasi publik teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih selama ini telah menemani penulis dalam perkuliahan dan tugas akhir dalam meraih sarjana.

Dalam naskah penelitian ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca untuk kesempurnaan usulan penelitian penulis serta diharapkan sebagai referensi untuk pembuatan usulan penelitian selanjutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta nusa dan bangsa, dan juga dapat menentukan khasanah cakrawala pemikiran para pembaca. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 18 Maret 2022
Penulis

RIA ANDRIYANI
NPM : 187110022

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING | i |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI | ii |
| BERITA ACARA KOMPREHENSIF SKRIPSI..... | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH..... | xv |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT | xvii |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 15 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 16 |
| BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN | 17 |
| A. Studi Kepustakaan..... | 17 |
| 1. Konsep Administrasi..... | 17 |
| 2. Konsep Administrasi Publik | 18 |
| 3. Konsep Organisasi | 20 |
| 4. Konsep Manajemen..... | 22 |
| 5. Konsep Tata Kelola..... | 24 |
| 6. Konsep Pengelolaan Keuangan..... | 28 |
| 7. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa..... | 29 |
| 8. Konsep Pembangunan Desa..... | 30 |
| B. Penelitian Terdahulu | 32 |
| C. Kerangka Pikir | 38 |
| D. Konsep Operasional | 39 |
| E. Operasional Variabel..... | 41 |
| F. Teknik pengukuran..... | 42 |

| | |
|--|------------|
| BAB III : METODE PENELITIAN..... | 46 |
| A. Jenis Penelitian..... | 46 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 47 |
| C. Populasi dan Sampel | 47 |
| D. Teknik Penarikan Sampel | 48 |
| E. Jenis dan Sumber Data..... | 49 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 50 |
| G. Teknik Analisa Data..... | 50 |
| H. Jadwal kegiatan penelitian | 52 |
| BAB IV : DISKRIPSIKAN LOKASI PENELITIAN..... | 53 |
| A. Sejarah ringkas dan gambaran umum Kabupaten Siak..... | 53 |
| 1. Keadaan geografis..... | 53 |
| 2. Profil kabupaten siak..... | 54 |
| 3. Profil kampung sengkemang..... | 56 |
| 4. Visi misi kampung sengkemang | 58 |
| B. Fungsi Dan Tugas Organisasi..... | 59 |
| C. Struktur organisasi | 63 |
| BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 64 |
| A. Identitas responden | 64 |
| 1. Tingkat kelamin | 64 |
| 2. Tingkat pendidikan | 65 |
| 3. Tingkat usia..... | 67 |
| B. Hasil penelitian pengelolaan keuangan desa bidang Pembangunan di kampung Sengkemang kecamatan koto gasib Kabupaten siak..... | 69 |
| 1. Transparasi | 69 |
| 2. Akuntabilitas | 77 |
| 3. Partisipatif | 82 |
| 4. Tertib dan disiplin anggaran..... | 89 |
| C. Rekapitulasi dari indikator-indikator pengelolaan Keuangan desa bidang pembangunan di kampung Sengkemang kecamatan koto gasib kabupaten siak..... | 95 |
| D. Faktor-faktor penghambat penelitian | 96 |
| BAB VI : PENUTUP..... | 98 |
| A. Kesimpulan | 98 |
| B. Saran..... | 99 |
| DAFTAR PUSTAKA | 101 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel I.1 : Profil Pejabat Structural Di Kantor Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak..... | 6 |
| Tabel I.2 : Daftar hadir rapat musrembang kampung Sengkemang Kecamatan koto gasib kabupaten siak | 8 |
| Tabel 1.3 : Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020..... | 9 |
| Tabel 1.4 : Program Bidang Pembangunan Desa Di Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Tahun 2020..... | 12 |
| Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu..... | 32 |
| Tabel II.2 : Operasional Variabel Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bidang pembangunan di Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak | 47 |
| Tabel III.1 : Key Informan/ Informan..... | 48 |
| Tabel III.2 : jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di Kampung Sengkemang kecamatan koto gasib Kabupaten siak | 52 |
| Tabel IV.1 : kecamatan dan jumlah kelurahan yang ada di Kabupaten Siak..... | 54 |
| Tabel IV.2 : luas wilayah menurut kecamatan dikabupaten siak..... | 55 |
| Tabel IV.3 : jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin kampung sengkemang..... | 56 |
| Tabel IV.4 : jumlah penduduk berdasarkan agama kampung Sengkemang | 57 |

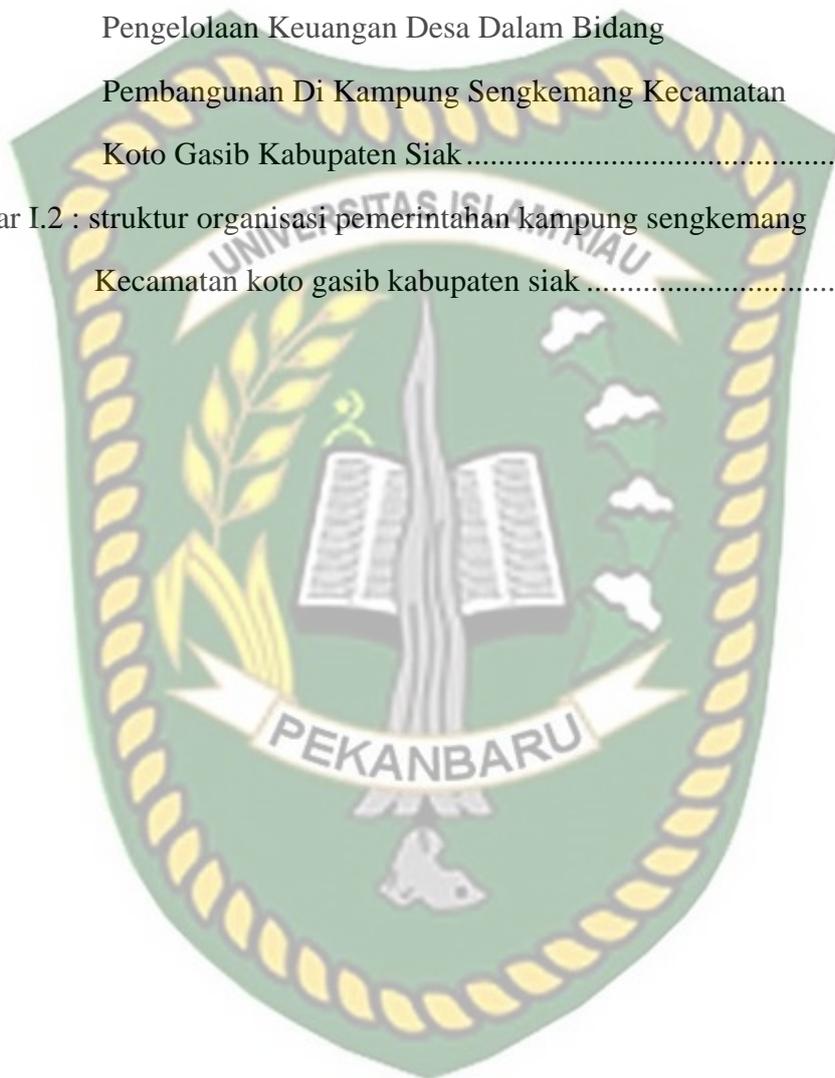
| | |
|---|----|
| Tabel IV.5 : jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian kampung Sengkemang | 59 |
| Tabel V.1 : distribusi identitas responden penelitian Pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung sengkemang kabupaten siak berdasarkan jenis kelamin | 65 |
| Tabel V.2 : distribusi identitas responden penelitian Pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung sengkemang kabupaten siak berdasarkan tingkat pendidikan..... | 66 |
| Tabel V.3 : distribusi identitas responden penelitian Pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung sengkemang kabupaten siak berdasarkan tingkat usia | 67 |
| Tabel V.4 : distribusi tanggapan responden tentang indicator transparasi dalam pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung Sengkemang kabupaten siak..... | 70 |
| Tabel V.5 : distribusi tanggapan responden tentang indicator akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung Sengkemang kabupaten siak..... | 78 |
| Tabel V.6 : distribusi tanggapan responden tentang indicator partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung Sengkemang kabupaten siak..... | 83 |
| Tabel V.7 : distribusi tanggapan responden tentang indicator tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung Sengkemang kabupaten siak..... | 90 |

Tabel V.8 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap
Pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan
di Kampung sengkemang kabupaten siak 95



DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| Gambar I.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Bidang Pembangunan Di Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak..... | 38 |
| Gambar I.2 : struktur organisasi pemerintahan kampung sengkemang Kecamatan koto gasib kabupaten siak | 63 |



DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|---|---------|
| lampiran 1 : dokumentasi foto penelitian tentang pengelolaan Keuangan desa bidang pembangunan di kampung Sengkemang kecamatan koto gasib kabupaten siak..... | 104 |
| lampiran 2 : kuisioner Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Bidang Pembangunan Di Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak..... | 109 |
| Lampiran 3 : lampiran daftar wawancara Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Bidang Pembangunan Di Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak..... | 115 |
| Lampiran 4 : daftar telly terhadap penelitian pengelolaan Keuangan desa bidang pembangunan dikampung Sengkemang kecamatan koto gasib kabupaten siak..... | 118 |
| Lampiran 5 : surat rekomendasi dari Fakultas ilmu social dan imlu Politik..... | 120 |
| Lampiran 6 : surat rekomendasi dari Kampung Sengkemang kecamatan Koto gasib kabupaten siak | 121 |
| Lampiran 7 : surat keputusan pembimbing..... | 122 |
| Lampiran 8 : surat keterangan jurnal online mahasiswa..... | 123 |
| Lampiran : surat Plagiasi Skripsi | 124 |
| Lampiran 10 : surat Bimbingan Baca Al-Qur'an..... | 126 |

SURAT PERNYATAAN

Nama : Ria Andriyani
NPM : 187110022
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul skripsi : Pengelolaan Keuangan Desa Bidang
Pembangunan di Kampung Sengkemang Kecamatan
Koto Gasib Kabupaten Siak

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Yang Menyatakan,


RIA ANDRIYANI

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BIDANG PEMBANGUNAN DI KAMPUNG SENGKEMANG KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK

ABSTRAK

Ria Andriyani

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung Sengkemang kecamatan koto gasib kabupaten siak. adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis deskriptif, penulisan ini menggambarkan kondisi objek yang ditemukan di lapangan berdasarkan data-data di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung sengkemang kecamatan koto gasib kabupaten siak. Indikator yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan tertib dan disiplin anggaran. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara dan observasi, dan data yang dikumpulkan kemudian disajikan sebagai bahan baku utama untuk menganalisis kondisi emiris dan objektivitas keberadaan dan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti terdapat 2 kelompok menjadi objek penelitian. Berdasarkan hasil dari observasi, kuisisioner dan wawancara pada penelitian pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung sengkemang kecamatan koto gasib kabupaten siak dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dikategorikan cukup baik, penelitian ini berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum efektif. Perangkat desa selalu menginformasikan pengelolaan keuangan desa ini kepada msyarakat melalui musyawarah. Perangkat desa juga menyediakan informasi keuangan desa di papan informasi berupa madding meskipun jarang diperbaharui.

Kata kunci : pengelolaan, transparan, akutabilitas, partsipasi, tertib dan disiplin anggaran

**VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN DEVELOPMENT IN
KAMPUNG SENGKEMANG, KOTO GASIB DISTRICT, SIAK REGENCY**

ABSTRACT

Ria Andriyani

This study aims to analyze village financial management in the field of development in Sengkemang Village, Koto Gasib District, Siak Regency. The method used in this study is a quantitative method with descriptive analysis, this paper describes the condition of objects found in the field based on data in the field relating to village financial management problems in the development sector in Sengkemang Village, Koto Gasib District, Siak Regency. The indicators used are transparency, accountability, participatory and orderly and budgetary discipline. The types and techniques of data collection used are interviews and observations, and the collected data is then presented as the main raw material for analyzing empirical conditions and objectivity of the existence and research objectives at the location studied, there are 2 groups that are the object of research. Based on the results of observations, questionnaires and interviews on research on village financial management in the field of development in Sengkemang Village, Koto Gasib District, Siak Regency, it can be concluded that this research is categorized as quite good, this research is effective. , although the allocation has not been effective. Village officials always inform the community about the financial management of this village through deliberation. Village officials also provide village financial information on information boards in the form of madding although it is rarely updated.

Keywords: Management, Transparency, Accountanbility, Participation, orderly and budget discipline

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini disebabkan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Kekayaan desa atau yang biasa disebut asset desa ialah harta yang dimiliki oleh desa dan hal itu yang membedakan antara desa dengan kelurahan. Pengelolaan asset desa yang baik dilakukan ini berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan mempunyai pedoman dalam pengelolaannya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, pengertian dari pengelolaan ialah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tangan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APB-Des. Dimana pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Ini maksudnya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola keuangan desa. Sekalipun otoritas

sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran ada pada seorang kepala desa.

Ada tiga jenis dokumen penting perencanaan yang mesti disediakan oleh pemerintah desa. Ketiga dokumen tersebut adalah RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Tanpa dokumen ini pemerintah desa tidak boleh mengelola keuangan desa. Jika pemerintah desa memaksakan diri, pasti akan timbul masalah dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang akan digunakan dalam kegiatan atau program pembangunan desa/kampung sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana di kampung tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan keuangan desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi :

1. Proses perencanaan dan penganggaran
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Laporan dan pertanggungjawaban
5. Pengawasan dan evaluasi

Peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan keuangan desa

No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bab II

asas pengelolaan keuangan desa asal 2 (2) keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Transparan
2. Akuntabilitas
3. Partisipatif
4. Tertib dan disiplin anggaran

Keuangan desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud merupakan pendapatan, belanja, pembinaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Pendapatan desa meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas ;

1. Pendapatan Asli Desa (PAD)
2. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/kota
3. Bagian dari retribusi kabupaten/kota
4. Alokasi Dana Desa (ADD)
5. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainnya
6. Hibah
7. Sumbangan pihak ketiga

Alokasi Dana Desa (ADD) ialah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diperoleh oleh kabupaten bersumber dari belanja pusat dengan menepktifkan program yang berbasis desa secara merata dan adil. Tujuan dari alokasi dana desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan pangaanggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan

4. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berbeda dengan Dana Desa yang sumber dananya berasal dari APBN langsung, Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD dengan jumlah sebesar 10%. Selain itu Dana Desa menjadi kewajiban pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggarannya kepada desa dengan prioritas penggunaan yang telah diatur melalui peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia. Alokasi dana desa menjadi kewajiban pemerintah kabupaten dalam mengalokasikan anggarannya kepada desa yang diperoleh dari dana bagi hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dana perimbangan, dengan tata cara penggunaannya telah diatur dalam peraturan bupati/walikota setiap tahunnya. Tujuan dari dana desa sama halnya dengan tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Salah satu desa yang mendapatkan kewenangan dalam pengelolaan dana desa adalah Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Kecamatan Koto Gasib memiliki luas wilayah 704.70 km², terdiri dari 11 Desa/ kelurahan dengan pusat pemerintahan berada di Kampung Pangkalan Pisang.

Kampung Sengkemang ialah salah satu desa yang berada di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, sebelah utara berbatasan dengan

Kampung Rantau Panjang, sebelah selatan berbatasan dengan kampung Empang Pandan, sebelah timur berbatasan dengan kampung Dayun/L.Tilan dan sebelah barat berbatasan dengan Kampung Buatan II. Jarak antara Kampung Sengkemang dengan pemerintahan kecamatan adalah kurang lebih 7 km, sedangkan dengan pemerintahan kabupaten kurang lebih 25 km, kemudian jarak dari ibu kota provinsi lebih kurang 72 km. Kampung Sengkemang terdiri atas 3 Dusun 3 Rukun Warga (RW), 8 Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 373 KK, sedangkan jumlah masyarakat Kampung Sengkemang keseluruhan adalah 1.432 orang.

Pengelolaan Keuangan Kampung Sengkemang Kecamatan Gasib Kabupaten Siak dikelola oleh aparatur desa yang meliputi Penghulu Kampung, Kerani Kampung, Bendahara Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPKam) dilakukan dengan baik dan transparan baik untuk kegiatan pembangunan fisik dan non fisik sehingga dalam pengelolaannya harus maksimal, Salah satu tugas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan tersebut yaitu menyampaikan laporan operasional Kampung tepat waktu dan Pelaksanaan tugas tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada beberapa masalah atau hambatan untuk melihat pencapaian laporan kegiatan operasional. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kepala desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari kerani, kepala seksi, dan bendahara pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Selanjutnya adapun profil struktural pemerintahan Kampung Sengkemang Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1 : Profil Pejabat Struktural di Kantor Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

| No | Nama | Jabatan | Pendidikan |
|----|----------------|--------------------|--------------|
| 1. | Adi Afri | Kepala Kampung | SMA |
| 2. | Fauzi | Kerani | SMA |
| 3. | Azura Andani | Kaur Keuangan | SMK kejuruan |
| 4. | Afrizal | Kaur Umum | SMA |
| 5. | Riki Saputra | Juru Tulis I | SMA |
| 6. | Fauzi | Juru Tulis II | SMK Kejuruan |
| 7. | Taufik Hidayat | Kadus Lingkar Padi | SMA |
| 8. | Afrizal | Kadus Paret Senang | SMA |
| 9. | Sukri | Kadus Dharma Bakti | SMA |

Sumber data : Kantor Kampung Sengkemang 2020

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pejabat struktural pada pemerintahan Kampung Sengkemang berjumlah 9 orang. Selain itu terlihat bahwa sebagian besar pendidikan pegawai Kampung Sengkemang adalah tamatan SMA, hanya ada dua orang tamatan SMK kejuruan.

Berdasarkan informasi dari wawancara sesorang tokoh masyarakat yang ada di Kampung Sengkemang mengenai partisipasi masyarakat dalam program bidang pembangunan di Kampung Sengkemang mengatakan :

“untuk raperdes yang kita susun setiap tahunnya prosesnya terlebih dahulu kita mengajukan selebaran undangan terhadap masyarakat melalui RT dan RW, kemudia RT dan RW dibahas dan diadakan musdus (musyawarah dusun). Stelah ini hasil musdus akan dibawa ke desa dan disepakati ataupun dibahas bersama didesa oleh kepala dusun, BPD, maupun dengan masyakat lainnya, dan untuk ditetapkan kedalam musrengbang untuk tiap tahunnya. Seperti yang kami katakana tadi bahwa setiap usulan-ususlan ataupun kegiatan yang telah dibahas di musdus dan musrengbang tersebut, dibahas lagi secara bersama oleh BPD dan kepala desa,dan kemudian ditetapkan setelah itu baru dituangkan dalam ranperdes RPJM, dan disampaikan kepada kepala desa”.

(wawancara, 01 November 2021).

Rencana peraturan desa yang disusun di Kampung Sengkemang , prosesnya terlebih dahulu yaitu mengajukan selebaran undangan terhadap masyarakat melalui RT dan RW,kemudian RT dan RW dibahas dan diadakan musyawarah yang dinamakan musdus (musyawarah dusun). Dan setelah hasil musdus nya di dapati, maka dibawa ke desa dan disepakati ataupun dibahas bersama di desa oleh kepala dusun, BPD maupun dengan masyarakat lain, dan untuk ditetapkan kedalam rencana peraturan desa untuk setiap tahunnya. Kemudian setiap usulan-usulan ataupun kegiatan yang telah dibahas di musdus dan musdes tersebut, akan dibahas terlebih dahulu secara bersama oleh BPD dan kepala desa, dan kemudian ditetapkan. Setelah itu baru dituangkan dalam ranperdes RPJM, dan di sampaikan kepada kepala Kampung Sengkemang.

Berikut adalah daftar hadir dalam penyusunan perencanaan pembangunan kamung tahun anggaran 2020 melalui musyawarah perencanaan pembangunan kampung (MUSREMBANG Kampung), yaitu :

Tabel I.2 : daftar hadir pada rapat musrembang kampung sengkemang

| No | Jabatan | Jumlah |
|--------|---------------|----------|
| 1 | Penghulu | 1 orang |
| 2 | Kerani | 1 orang |
| 3 | Kaur umum | 1 orang |
| 4 | Kaur keuangan | 1 orang |
| 5 | Juru Tulis | 2 orang |
| 6 | RT | 4 orang |
| 7 | RW | 3 orang |
| 8 | Anggota | 6 orang |
| 9 | Masyarakat | 15 orang |
| Jumlah | | 34 orang |

Sumber : Kantor Kampung Sengkemang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam musrembangkam. Hal ini membuktikan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat untuk menghadiri permusyawaratan atau rapat yang dilaksanakan untuk perencanaan pembangunan oleh pemerintahan desa padahal pembangunan itu sendiri diperuntukkan untuk masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dalam peraturan desa. Selanjutnya jumlah Anggaran keuangan Desa yang diterima oleh Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak pada tahun 2020 sebesar Rp.2.203.266.355. keuangan desa yang dimaksud untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan

pemerintahan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2020 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.3 : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020

| No | Uraian | Jumlah Anggaran (Rp) |
|-----------|---|----------------------|
| 1. | Pendapatan : | |
| | - Pendapatan asli desa | 2.397.331 |
| | - Dana desa (APBN) | 906.397.000 |
| | - Bagi hasil pajak dan retribusi | 83.429.000 |
| | - Alokasi Dana Desa (ADD) | 1.102.809.000 |
| | - Bantuan keuangan provinsi | 85.000.000 |
| | - Bantuan keuangan kabupaten | 22.400.000 |
| | - Bunga bank | 834.024 |
| | Jumlah Pendapatan | 2.203.266.355 |
| 2. | Belanja : | |
| | - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 928.667.096 |
| | - Bidang pembangunan Desa | 1.056.503.230 |
| | - Bidang Pembinaan Masyarakat | 237.782.575 |
| | - Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 1.820.000 |
| | - Bidang Penanggulangan Darurat dan Mendesak Desa | 74.027.970 |
| | Jumlah Belanja | 2.298.800.871 |
| | Syrplus/Deficit (Pendapatan-Belanja) | -95.534.516 |

Sumber : Data Kantor Sengkemang 2020

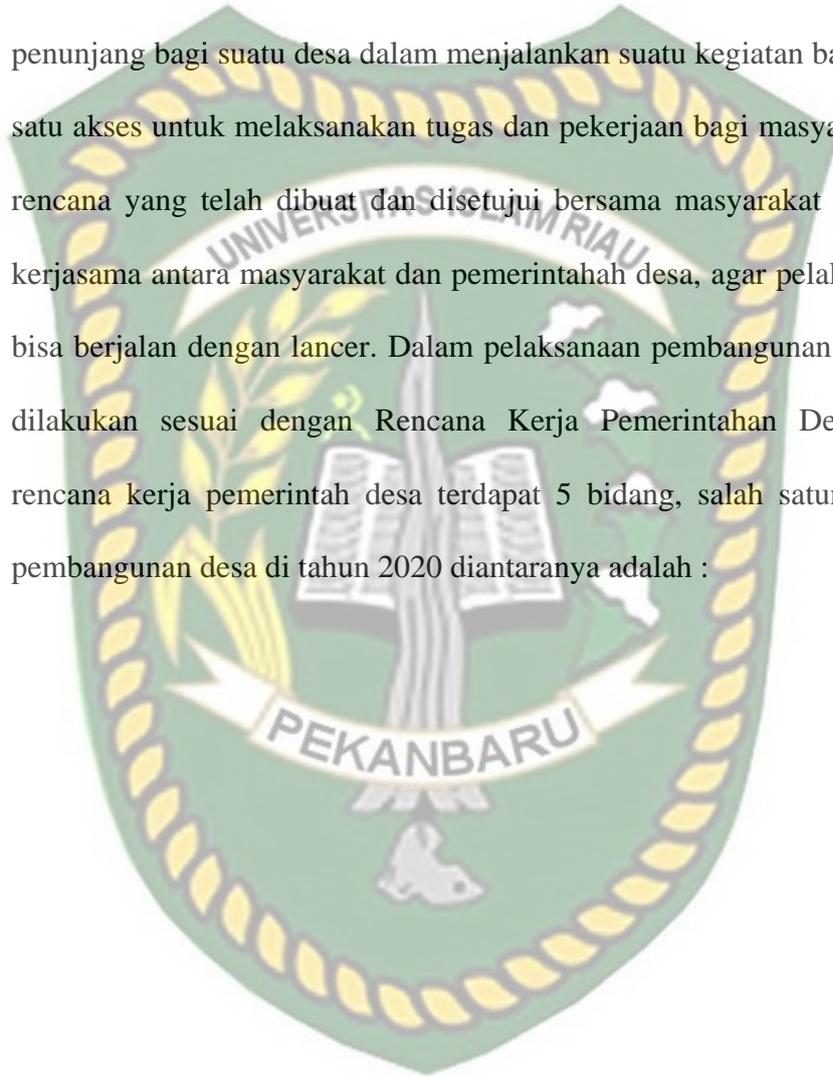
Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah pendapatan Kampung Sengkemang tahun 2020 yang berjumlah Rp. 2.203.266.355. Keseluruhan anggaran yang diperoleh desa yang terakumulasi dari beberapa sumber diantaranya Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten, Bantuan Khusus Keuangan Provinsi dan Bunga Bank. Jumlah belanja tahun 2020 sebanyak Rp. 2.289.800.871. Namun ada kekurangan dana sebesar Rp. 95.534.516, belanja desa digunakan di bidang peyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan darurat dan mendesak desa.

Mekanisme dan prosedur dalam penyaluran anggaran dana desa bagi pembangunan dan kegiatan berskala lokal di desa dilaksanakan secara bertahap yakni:

1. Pemerintah melakukan penyaluran melalui rekening kas umum daerah (RKUN)
2. Selanjutnya dilakukan penyaluran melalui rekening kas umum daerah (RKUD)
3. Yang selanjutnya pemerintah kabupaten/kota menyalurkannya kepada desa melalui rekening kas desa (RKD) yang dibagi lagi dalam 3 tahap, dimana tahap pertama sebesar 40 %. Tahap Kedua 40 % dan tahap ke tiga sebesar 20 %.

Pengelolaan dimaksudkan untuk merencanakan serta melaksanakan, setelah direncanakan semua program dan kegiatan maka harus dilakukan dengan baik dan benar. Tujuannya suatu rencana dapat memberikan kelegaan serta kebahagiaan kepada masyarakat, Pengelolaan

keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dijalankan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali. Pembangunan ialah salah satu alat penunjang bagi suatu desa dalam menjalankan suatu kegiatan bahkan salah satu akses untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan bagi masyarakat. Dari rencana yang telah dibuat dan disetujui bersama masyarakat dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintahah desa, agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan pembangunan desa harus dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Dalam rencana kerja pemerintah desa terdapat 5 bidang, salah satunya bidang pembangunan desa di tahun 2020 diantaranya adalah :



**Tabel I.4 : Program Bidang Pembangunan Desa di Kampung
Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten
Siak Tahun 2020**

| No | Program bidang pembangunan | Lokasi | Anggaran (Rp) | Sumber Dana | Terlaksana | Tidak Terlaksana |
|---|--|------------|---------------|-------------|------------|------------------|
| 1. | Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang : | | | | | |
| | - Pengecatan gapura | RT.02 | 804.000 | ADD | ✓ | |
| | - Seminisasi jalan suak mjam | RT.03 | 108.821.400 | APBN | | ✓ |
| | - Seminisasi jalan mungkal | RT.03 | 205.840.300 | APBN | ✓ | |
| | - Pembangunan box culvert | RT.02 | 57.390.300 | APBN | ✓ | |
| | - Pembangunan box culvert | RT.03 | 57.390.300 | APBN | ✓ | |
| | - Pembangunan box culvert | RT.04 | 59.435.000 | ADD | | ✓ |
| | - Gapura lingkaran padi | RT.04 | 29.065.000 | ADD | ✓ | |
| | - Pembuatan parit tapal batas | RT.08 | 46.985.000 | ADD | | ✓ |
| - Operasional pembuatan batok batas kampung | RT.08 | 970.000 | PBH | ✓ | | |
| 2. | Sub bidang kawasan pemukiman : | | | | | |
| | - Pembuatan drainase | RT.01 | 148.056.400 | APBN | ✓ | |
| | - Pembuatan sumur bor + MCK umum | RT.05 | 72.543.130 | ADD | | ✓ |
| 3. | Sub bidang kesehatan dan lingkungan hidup : | | | | | |
| | - Pembersihan lahan desa | RT.08 | 27.840.400 | APBN | ✓ | |
| 4. | Sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika | | | | | |
| | - Website kampung | - | 5.450.000 | ADD | | ✓ |
| 5. | Sub bidang energy dan sumber daya mineral | | | | | |
| | - Pengadaan lampu jalan | RT.01 - | 26.480.000 | ADD | | ✓ |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------|------------|--------------------------|---|--|
| | poros kampung | RT.08 | | | | |
| 6. | Sub bidang pendidikan : | | | | | |
| | - Honorarium guru PAUD Meutia Indah | - | 18.000.000 | APBN | ✓ | |
| | - Honorarium guru TK/RA swasta | - | 22.400.000 | PBK | ✓ | |
| | - Pengadaan buku perpustakaan | - | 39.600.000 | ADD | ✓ | |
| 7. | Sub bidang kesehatan : | | | | | |
| | - Makanan tambahan posyandu | - | 9.600.000 | APBN | ✓ | |
| | - Insentif kader posyandu | - | 73.200.000 | APBN | ✓ | |
| | - Makanan tambahan BKB | - | 1.000.000 | ADD | ✓ | |
| | - Pengadaan sarana/prasarana posyandu | - | 45.632.000 | PBH | ✓ | |
| | Anggaran Terlaksana | | | Rp. 736.788.700 | | |
| | Sisa Anggaran | | | Rp. 319.715.330 | | |
| | Jumlah Anggaran Keseluruhan | | | Rp. 1.056.503.230 | | |

Sumber : Data Kantor Kampung Sengkemang 2020

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwasanya program pembangunan desa yang ada di tahun 2020 di Kampung Sengkemang kecamatan koto gasib kabupaten siak, ada 21 program pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.056.503.230. Program yang terlaksana atau terealisasi ada 15 program yaitu pengecatan gapura, seminisasi jalan Mungkal, pembangunan Box Culvert RT 02 dan RT.03, pembangunan gapura Lingkar Padi, operasional pembuatan batok batas kampung, pembuatan drainase, pembersihan lahan, honorarium guru PAUD dan TK, pengadaan buku perpustakaan, makan tambahan posyandu dan BKB, insentif kader posyandu, dan pengadaan sarana dan prasarana

posyandu, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 736.787.700 sebagian besar bersumber dari dana APBN. dan ada 6 program pembangunan yang tidak terlaksana yaitu seminisasi jalan suak miam, pembangunan box culvert RT.04 pembuatan parit tapal batas, pembuatan sumur bor dan MCK umum, website kampung, dan pengadaan jalan poros kampung, yang rata-rata berasal dari dana ADD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.319.715.530. pembangunan yang tidak terlaksana diakibatkan adanya perubahan anggaran sekaligus beberapa rasionalisasi anggaran untuk pembangunan sehingga ada beberapa pembangunan yang tidak dapat direalisasikan, ditambah pula karena adanya pengalihan dana untuk keperluan yang lebih mendesak, sehingga beberapa rencana pembangunan dapat dilaksanakan untuk di masa tahun anggaran berikutnya, dengan ini menunjukkan bahwa ternyata masih ada beberapa pembangunan yang dilaksanakan belum dapat dilakukan secara optimal.

Pengelolaan keuangan desa di Kampung Sengkemang belum maksimal dilakukan karena sumber daya manusia yang masih rendah baik dari segi kemampuan teknis maupun administrasinya. Permasalahan yang terjadi adalah beberapa dana desa yang belum terlaksana sepenuhnya atau tidak dapat terealisasi.

Alasan meneliti tentang pengelolaan keuangan desa karena jumlah anggaran yang diberikan kepada desa/kampung yang relatif besar tetapi penggunaannya atau realisasi tidak sesuai dengan perencanaan.

Dari hasil observasi penulis dilokasi penelitian mengenai permasalahan pengelolaan keuangan desa tersebut ditemukan ada beberapa fenomena/gejala, yaitu :

1. Staff Keuangan desa yang kurang kemampuan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
3. Masih banyak perencanaan pembangunan yang dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa program yang belum terealisasi.

Berdasarkan dari gejala dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengelolaan Keuangan Desa Bidang Pembangunan di Kampung Sengkemang kecamatan koto gasib Kabupaten Siak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu :

Bagaimana pengelolaan Keuangan Desa Bidang Pembangunan di Kampung Sengkemang Kecamatan Gasib Kabupaten Siak ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis bagaimana pengelolaan Keuangan Desa Bidang Pembangunan di Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan sebagai :

- a. Manfaat untuk pengembangan ilmu administrasi
- b. Bahan masukan bagi aparatur Desa/Kampung agar senantiasa dalam pengelolaan keuangan dengan professional dan melakukan evaluasi dengan sebaik mungkin dalam mengelola keuangan di Kampung Sengkemang tersebut.
- c. Informasi lanjutan bagi peneliti lainnya, terutama peneliti yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan penelitian tentang pengelolaan Keuangan Desa dan/atau yang mengambil permasalahan yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai acuan untuk menjawab tujuan penelitian ini, penulis mengembangkan beberapa studi kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian. Berikut ini penulis mengemukakan konsep-konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara lain :

1. Konsep Administrasi

Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa latinad dan ministrare, yang artinya “membantu, melayani, dan memenuhi”, dan administration artinya pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”. (Menurut Prof. Dr. H. Wirman Syafri, M.Si).

Menurut Sondang P. Siagian administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilaksanakan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam Syafie, 2003;5).

Menurut Leonard D. White mengemukakan bahwa administrasi ialah proses yang selalu terdapat setiap usaha kelompok, publik/privat,

sipil/militer, skala besar atau kecil. Pendapat ini juga menunjuk dua hal, yaitu sebagai berikut : administrasi merupakan proses (rangkaiannya kegiatan) dan proses itu terdapat pada setiap usaha kelompok (dalam Wirman Syafri, 2012;9).

Menurut The Liang Gie administrasi ialah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan orang-orang yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu (dalam Inu Kencana Syafri, 2003;4).

Menurut Herbert A. Simon mendefinisikan administrasi ialah kegiatan kelompok-kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama (dalam Pasolong, 2013;2)

Suatu pendekatan yang bisa dilakukan oleh seorang administrasi ialah harus melakukan suatu pendekatan yaitu salah satunya dapat dilihat sejauh ini adalah dapat berperang pada sebuah prinsip yang telah kita tanamkan terhadap diri dan dapat diyakini benar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Oleh sebab itu prinsip yang diyakini benar itu akan dijadikan pengangan dan tiruan yang sangat mendukung terhadap upaya suatu pencapaian dan hasil yang diharapkan dalam sebuah organisasi.

2. Konsep Administrasi Publik

Administrasi terbagi menjadi dua yaitu administrasi publik dan administrasi bisnis. Administrasi publik (public administration) adalah suatu bahasan ilmu social yang mempelajari tiga elemen penting dalam

kehidupan Negara yang merangkup lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, etika yang mengatur penyelenggaraan Negara serta tujuan Negara.

Beberapa ahli telah mengemukakan pendapat terkait arti dari administrasi public. Seperti menurut Siagian (dalam Andry 2015:14) bahwa administrasi public adalah semua atau keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan negar tersebut.

Kemudian Plato dan Chabdler (dalam Keban, 2014:3) bahwa administrasi publik ialah proses dimana sumber daya dan personil publik memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat di usur-unsur (selain perkembangan ilmu administrasi public itu sendiri) yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi public, yang ada ada prinsipnya berkenan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
- b. Manajemen public, yaitu berkenan dengan system dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran public, dan manajemen sumber daya manusia.
- c. Implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan public dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Tidak hanya itu, D.Waldo (Beddy Iriawan dalam Syafi'I 2017;

223) administrasi public adalah organisasi dan manajemen manusia dan manjerial (peralatannya) untuk mencapai tujuan.

Menurut Dimock (dalam Beddy Iriawan 2017;224) administrasi public adalah mempersoalkan masalah-malasaah “apa’dan maasalah

“bagaimana” dalam lingkungan pemerintahan. Masalah-malasaah “apa” merupakan persoalan subjek pengetahuan mengenai suatu lapangan yang memungkinkan seseorang administrator menjalankan tugas-tugasnya. Masalah “bagaimana” adalah berhubungan dengan teknik daripada manajemen, yakni prinsip-prinsip yang menjadi dasar untuk melaksanakan rencana-rencana kooperatif hingga berhasil. Masing-masing merupakan keharusan kedua-duanya bersama-sama membentuk sintesis yang disebut administrasi.

Kemudian menurut Wilson (dalam Syafi,I 2012) juga mengemukakan bahwa administrasi public adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan public secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa batasan administrasi public diatas tergambar konsep administrasi dalam mencapai keseluruhan aktivitas kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menyelesaikan aktivitas pemerintahan dalam rangka mencapai segala tujuan-tujuan bernegara yang ditetapkan sebelumnya.

3. Konsep Organisasi

Organisasi adalah suatu wahana yang secara structural menghubungkan sejumlah manusia untuk bekerjasama mencapai suatu tujuan berdasarkan mekanisme kerja dan pembagian fungsi seperti apa

yang telah ditetapkan. Secara sederhana organisasi memiliki tugas unsur yaitu orang-orang, adanya kerja sama, dan adanya tujuan bersama.

Menurut Siswanto (2013;73) organisasi ialah adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak siap untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.

Menurut Marium (dalam Sufian 2001,235) organisasi terdiri dari adanya kelompok orang yang mempunyai tujuan bersama yang hanya dapat diselenggarakan dengan kerjasama atau usaha bersama antara anggota kelompok, agar kerja sama berjalan dengan baik dan teratur, maka diadakanlah pembagian kerja dibawah satu pimpinan.

Menurut Wijayanti (2008;4) organisasi merupakan suatu system yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok manusia untuk mencapai tujuan.

Seperti yang dijelaskan oleh para ahli yang salah satunya Sondang P. Siagian (dalam bukunya filsafat administrasi) setia bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan sesorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Pengertian diatas memperjelaskan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan didalamnya.

- b. Organisasi sebagai rangkaian hirarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal, sebagai wadah organisasi relative bersifat statis, sedangkan sebagai suatu rangkaian hirarki dan intraksi manusia, organisasi ialah suatu proses dan dengan demikian ia bersifat lebih dinamis.

Menurut Marium (dalam Sufian 2001, 235) organisasi terdiri dari adanya kelompok orang yang memiliki tujuan bersama yang hanya dapat diselenggarakan dengan kerjasama berjalan dengan baik dan teratur, maka diaturlah pembagian kerja dibawah satu pimpinan.

4. Konsep Manajemen

Secara etimologi management atau manajemen berasal dari kata manus (tangan) dan agree (melakukan) yang setelah digabung menjadi manage (bahasa inggris) berarti mengurus atau managiere (bahasa latin) berarti melatih.

Menurut Siagian (2011;5) manajemen sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan apa yang mau dicapai serta tujuan dan berbagai keterampilan orang yang menduduki jabatan manejerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Sheldon (dalam Syafie, 2013;117) manajemen merupakan sebagai fungsi kajian industry dalam pelaksanaan kebijakan, dipandang dalam batas-batas kumpulan penyelenggaraan, dalam pekerjaan organisasi untuk mencapai tujuan khusus yang akan datang.

Menurut Stoner (dalam Handoko, 2002;2) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian pengarahan, dan pengawasan

usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Menurut Stoner, et al (dalam Zulkifli, 2005;28) manajemen berarti proses merencanakan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditentukan.

Menurut Frederick W.Taylor ilmu manajemen itu dapat diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya akan anda kerjaka selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan terbaik serta termudah(dalam Inu Kencana Syafi'I.2011;1).

Menurut Davis (dalam Sufian 1995;117) manajemen ialah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi administrasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Jhon D (dalam Sufian 1995;177) manajemen yaitu proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari masing-masing orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Manajemen dibutuhkan oleh semua orang atau organisasi. Tanpa manajemen usaha untuk mencapai suatu tujuan akan sia-sia belaka. Alasan diperlukan manajemen adalah :

1. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan pribadi, kelompok, organisasi, atau perusahaan.
2. Manajemen dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan diantara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan

dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau perusahaan, seperti pengusaha dan karyawan, kreditur dengan masalah, atau masyarakat dengan pemerintah

3. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan produktifitas kerja organisasi atau perusahaan

Manajemen sebagai proses penyelenggaraan bermacam kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan orang lain. Suatu proses merupakan susunan aktivitas yang satu sama lainnya saling bersusulan. Proses manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas yang wajib dilakukan oleh seorang manajer dalam suatu organisasi. Dan organisasi public sering kita lihat pada bentuk organisasi instansi pemerintahan yang juga dikenal dengan birokrasi pemerintahan.

5. Konsep Tata Kelola

Tata Kelola dilakukan oleh suatu organisasi, lembaga dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dengan tata kelola dalam pemerintahan yang baik maka akan terciptanya pemerintahan yang baik.

Menurut Akhmedi (2004) tata kelola pemerintahan merupakan suatu pelayanan publik yang efisien, sebuah sistem peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah sistem pemerintahan yang bertanggung jawab kepada publik. tata kelola pemerintahan yang baik adalah mampu menciptakan pembangunan yang baik serta membuat dan menciptakan lingkungan yang mendukung berlangsungnya pembangunan yang kuat dan merata

Menurut Goran Hyden (dalam Dwipayana, 2003) secara komprehensif mengidentifikasi 3 dimensi besar dalam konteks governance. Yaitu :

- a. Aktor, Dimensi aktor mencakup kekuasaan, kewenangan, resiprositas dan pertukaran
- b. Structural, Dimensi structural mencakup elemen elemen seperti ketulusan (compliance), trust (kepercayaan). Akuntabilitas dan inovasi
- c. Empiris, Dimensi empirik governance mencakup tiga elemen utama : pengaruh warga negara ; resiprositas sosial serta kepemimpinan yang responsive serta bertanggung jawab.

Menurut Bratton (dalam Dwipayana, 2003) dengan berpijak pada studi Hyden membuat ringkasan tentang makna tata kelola/governance :

- a. Governance adalah sebuah pendekatan konseptual yang bisa memberi kerangka bagi analisis komparatif pada level politik makro
- b. Governance sangat menaruh perhatian pada pertanyaan besar tentang hakekat konstitusional yang mengabdikan aturan main politik
- c. Governance mencakup intervensi kreatif oleh aktor politik pada perubahan structural yang menghalangi pengembangan potensi manusia
- d. Governance adalah sebuah konsep yang menekankan hakekat interaksi antara negara dan aktor sosial serta di antara aktor sosial sendiri
- e. Governance menunjuk pada tipe khusus hubungan antara aktor politik yang menekankan aturan main bersama dan sanksi sosial ketimbang kesewenang wengan.

Menurut Chhotray dan Stoker (2014) Tata Kelola adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan karena ada pluralitas/kemajemukan aktor atau organisasi dan karena tidak ada sistem kontrol formal yang dapat menentukan hal hubungan antara para aktor dan organisasi tersebut.

Lalu menurut Utomo dan Mariana (2011) Tata kelola merupakan struktur hubungan dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Sedangkan menurut Santosa (dalam astuti 2006) dalam rangka mendukung terwujud nya Tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu :

a. Transparan

Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Febrian,2018:562)

Menurut Mahmudi (2011) Transparansi memiliki arti Transparan merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip Good Governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual,

b. Akuntabel

Menurut Sujarweni (2015:28) menyatakan akuntabilitas Merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan /pejabat/

pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggungjawaban secara periodic. (Mardiasmo dalam Yuslaini,2021:135-141)

Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan. Akuntabilitas salah satu karakteristik good governance yang digunakan untuk melihat tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan tugas yang telah menjadi kewenangannya. (Febrian,2018:1-35)

Lalu (Mardiasmo 2002) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

c. Partisipatif

Sujarweni (2015) mendefinisikan yang dimaksud dengan partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh

pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

d. Tertib dan disiplin Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

6. Konsep pengelolaan keuangan

Menurut Devas (2007:279) pengelolaan artinya mengurus dan mengatur keuangan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Tanggung jawab (sccountability)

Organisasi harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dari tanggung jawab yaitu mencakup keabsahan yang artinya setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tempat penggunaannya.

b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Pengelolaan keuangan harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

c. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya

d. Hasil guna (efficiency) dan daya guna (efficiency)

Merupakan tata cara mengurus keuangan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan yang ditetapkan dan dalam waktu secepatnya.

e. Pengendalian

Para aparat pengelolaan keuangan dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

Pada dasarnya pengelolaan (manajemen) keuangan adalah sebuah proses memperoleh, mengelola serta menggunakan dana yang ada didalam suatu organisasi.

7. Konsep pengelolaan keuangan desa

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup

1. Perencanaan APBDesa
2. Pendapatan dan belanja
3. Pengumpulan pendapatan dan berbagai sumber, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dan pemerintahan atasan, dan lain-lain.
4. Pembelanjaan atau alokasi.

Ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan karena keuangan desa sangat erat berkaitan dengan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan yaitu :

1. Didalam mengelola keuangan desa, pemerintah desa harus bertanggung jawab kepada masyarakat karena pengelolaan keuangan desa bukan hanya kewenangan pemerintahan desa yang mengelola tetapi masyarakat juga memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam merencanakan APBDes, masyarakat harus mengetahui pengelolaan keuangan desa secara transparan.
2. Keuangan desa tidak harus dialokasikan untuk gaji aparatur desa, tetapi keuangan desa bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) para aparatur desa.
3. Pembinaan kemasyarakatan juga hal perlu dilakukan karena bagian dari program desa yang didanai oleh keuangan desa.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, asas-asas pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan yaitu :

1. Transparan
2. Akuntabel
3. Patisipatif
4. Tertib dan disiplin Anggaran

8. Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan ialah suatu proses rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahapan-tahapan yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan

bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menentukan pertahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan.

Menurut Afifuddin (2015:52) pembangunan ialah suatu proses rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahapan-tahapan yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan 'bagian' dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menentukan pertahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan.



B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

| No | Nama & judul jurnal | Tujuan | Metode | Analisa data | Hasil |
|----|---|--|------------|--------------|--|
| 1 | Chairun Amalia. 2019. evaluasi pengelolaan keuangan desa (studi kasus pengelolaan keuangan desa pada desa di kota Pariaman) | Untuk mengetahui penerapan pengelolaan keuangan di beberapa desa yang ada di kota pariaman dengan membandingkan tiga desa dari tingkat realisasi tertinggi, sedang dan terendah. | deskriptif | kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 3 perangkat desa tersebut aparatur perangkat desa masih kurang memiliki pemahaman bagaimana dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, tahapan apa saja yang harus dilakukan, kurang bisa memahami dan menjelaskan alat evaluasi apa yang digunakan pada tiap tahapan pengelolaan keuangan. Faktor yang mempengaruhi pencapaian realiasi belanja desa adalah kerjasama yang kuat antara aparat desa, kedisiplinan aparat desa, dan tenaga SDM desa. Dinilai pada penelitian yang dilakukan pada tiga desa yang ada di Kota Pariaman dengan tanggung jawab yang begitu besar dari desa, tidak disokong dengan SDM yang memadai serta komitmen kerja yang tinggi. |
| 2 | Novi Ferarow. Implemen | Untuk mendeskripsikan | deskriptif | kualitatif | terdapat dinamika dalam pengelolaan keuangan desa. Desa |

| | | | | | |
|---|--|---|------------|------------|---|
| | <p>tasi pengelolaan keuangan desa sumberadi dan tlogoadi di Kabupaten Sleman : Evaluasi praktik Transparansi dan Akuntabilitas</p> | <p>transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam mewujudkan</p> | | | <p>Sumberadi sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, Desa Tlogoadi belum mewujudkan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel; serta belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan. Beberapa kendala yang dihadapi desa Tlogoadi, diantaranya belum efektifnya pembinaan terhadap aparatur desa, kurangnya pengawasan, kurangnya personil, dan kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap peraturan yang berlaku.</p> |
| 3 | <p>Gunawan Arif Wobowo. 2017. Evaluasi pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa (desa wonosari kecamatan grogol</p> | <p>Untuk mengkaji pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa</p> | deskriptif | kualitatif | <p>1)Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk desa wonoasri di bagi menjadi yaitu 30% untuk kegiatan pemerintah dan BPD 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. 2) Stakeholders yang terlibat dalam penegelolaan alokasi dana desa meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua LPMD. 3) Dalam pembangunan</p> |

| | | | | | |
|---|---|--|------------|------------|--|
| | kabupaten Kediri) | | | | <p>sarana prasarana desa di Desa Wonoasri adanya kesalahan dalam memposkan anggaran, adanya usulan yang tidak di akomodir, perencanaan pengalokasian alokasi dana desa tidak mempertimbangkan periode masa jabatan kepala desa serta perencanaan yang kurang matang. 4) Faktor pendukung pengelolaan alokasi dana desa meliputi: adanya peraturan perundang-undangan, adanya pengawas dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan faktor penghambat dari pengelolaan alokasi dana desa meliputi keterbatasan dana alokasi desa yang dialokasikan untuk pembangunan sarana prasarana desa, tidak digunakannya RJMDesa dan hasil musrenbang dalam menetapkan pembangunan sarana dan prasarana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta masih adanya budaya paternalisti</p> |
| 4 | Ali Ulumudin . 2018. Evaluasi pengelola | Untuk mengevaluasi i pengelolaan dana desa di desa Puser | deskriptif | kualitatif | evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>an dana desa di desa Puser Kecamatan Tritayasa Kabupaten Serang tahun 2016</p> | <p>Kecamatan Tritayasa Kabupaten Serang tahun 2016</p> | | <p>bahwa program dari anggaran dana desa pada tahun 2016 di Desa Puser lebih kepada pembangunan infrastruktur, Anggaran dana desa pada tahun 2016 belum transparan kepada masyarakat secara peruntukan maupun rincian jelasnya, di dalam pengelolaan dana desa di Desa Puser belum melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya seperti perencanaan ataupun dalam pelaksanaannya. Kinerja aparatur desa puser dan pendamping desa dirasa masih kurang memuaskan dan belum paham mengenai pemerintahan desa. Pada tahap kedua pelaksanaan pembangunan pada tahun 2016 dari anggaran dana desa mengalami keterlambatan. Adanya dana desa di Desa Puser pada tahun 2016, belum bisa mengatasi perekonomian masyarakat, dana desa di Desa Puser lebih memprioritaskan kepada pembanguan fisik sehingga dalam dalam pembangunan</p> |
|--|---|--|--|--|

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

| | | | | | |
|---|--|--|------------|------------|--|
| | | | | | <p>non fisik seperti pemberdayaan, masyarakat belum berdaya secara skill dan kemampuan untuk maju dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Masyarakat desa Puser pada tahun 2016 tidak mengetahui dari laporan dana desa maupun pertanggungjawabannya, dan di Desa Puser pada tahun 2016 tidak ada pemberdayaan dari anggaran dana desa.</p> |
| 5 | <p>Cella Mita Y.A. 2020. Evaluasi pengelolaan dana desa tahun anggaran 2018 di desa tahun anggaran 2018 di desa pujon Kidul kecamatan Pujon kabupaten malang</p> | <p>Untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa tahun anggaran 2018 di desa pujon Kidul kecamatan Pujon kabupaten malang</p> | deskriptif | kualitatif | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 3 perangkat desa tersebut aparat perangkat desa masih kurang memiliki pemahaman bagaimana dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, tahapan apa saja yang harus dilakukan, kurang bisa memahami dan menjelaskan alat evaluasi apa yang digunakan pada tiap tahapan pengelolaan keuangan. Faktor yang mempengaruhi pencapaian realiasi belanja desa adalah kerjasama yang kuat antara aparat desa, kedisiplinan aparat desa, dan tenaga SDM desa. Dinilai pada penelitian yang</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | dilakukan pada tiga desa yang ada di Kota Pariaman dengan tanggung jawab yang begitu besar dari desa, tidak disokong dengan SDM yang memadai serta komitmen kerja yang tinggi. |
|--|--|--|--|--|--|

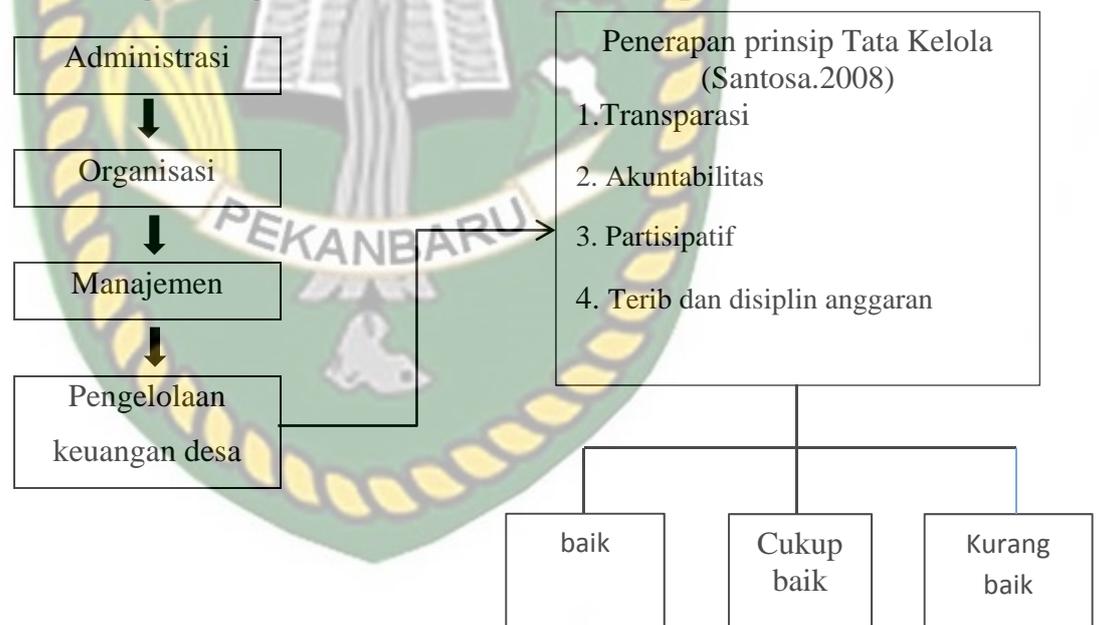
Sumber : data Penelitian, 2020

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas tentang pengelolaan keuangan desa yang dijadikan rujukan dan referensi pada penelitian ini terdapat beberapa perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti laksanakan. Peneliti tertarik untuk meneliti penelitian tentang pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung sengkemang kecamatan koto gasib. Karena judul penelitian ini masih perlu didalami dan sangat berpengaruh terhadap berjalannya sebuah program pembangunan dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan efektifitas kinerja suatu program dan roda pemerintahan. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini memakai teori tata kelola menurut Santosa.2008 dalam rangka mendukung terwujud nya Tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola dengan indikator transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran, dan menggunakan penelitian metode kuantitatif.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator terkait didalam variable penelitian kerangka pikir pada variabel penelitian ini menyangkut tentang bagaimana pelaksanaan penelitian data diajalankan dengan baik yang berdasarkan dengan pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan yang terjadi pada penelitian pengelolaan keuangan desa di Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

Gambar I.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bidang pembangunan di Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak



Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2021

D. Konsep Operasional

1. Pengelolaan adalah suatu kegiatan mendayagunakan anggaran dana desa agar dapat di gunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Keuangan Desa adalah seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang seta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
3. Pengelolaan Keuangan desa adalah kegiatan pendayagunaan anggran dana desa yang diulai dari tahapan perencanaan sampai pengawasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.
4. Pembangunan adalah suatu proses rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahapan-tahapan yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir
5. Transparasi adalah terbukanya akses bagi seluruh masyarakay terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa di Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.
6. Akuntabel adalah proses saat sebuah organisasi membuuat laporan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya di Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.
7. Partisipasif adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi serta perasaan yang mendorongnya untuk memberikan

sumbangan dalam usaha pengelolaan keuangan desa di Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

8. Tertib dan Disiplin anggaran mempunyai arti bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.



E. Operasional Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian dioperasionalkan sebagai berikut :

Tabel II.2 : Operasional Variable Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

| Konsep | Variabel | Indikator | Item penilaian | terlaksana |
|--|---------------------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Tata Kelola (Santosa.2008) Dalam rangka mendukung terwujud nya Tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola | Pengelolaan keuangan desa | Transparan | <ul style="list-style-type: none"> •Kemudahan informasi tentang keuangan desa •Sarana pra sarana informasi tentang keuangan desa •Keterbukaan pemerintahan desa dalam penggunaan keuangan desa | Baik Cukup baik Kurang baik |
| | | Akuntabilitas | <ul style="list-style-type: none"> •Pertanggung jawaban yang disampaikan kepada masyarakat •Kelengkapan administrasi penunjang akuntabilitas | Baik Cukup baik Kurang baik |
| | | Partisipatif | <ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan masukan masyarakat | Baik Cukup baik Kurang baik |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat keterlibatan masyarakat dalam musrebangdes | |
| | | Tertib dan disiplin anggaran | <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi anggaran pengelolaan sesuai RAB dan LPJ • Pelaksanaan dengan aturan | <p>Baik</p> <p>Cukup baik</p> <p>Kurang baik</p> |

Sumber : Olahan penelitian 2021

F. Teknik pengukuran

Pengukuran terhadap indicator di penelitian ini diklarifikasikan dalam 3 kategori yaitu baik, cukup baik, kurang baik.

Adapun kategori pengukuran indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Transparasi

baik :

Apabila hasil penelitian terhadap indikator transparasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 67%- 100%

Cukup baik :

Apabila hasil penelitian terhadap indikator transparasi telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 34%- 66%

Kurang baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator transparansi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 0%-33%

2. Akuntabilitas

baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator akuntabilitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 67%-100%

Cukup baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator akuntabilitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 34%-66%

Kurang baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator akuntabilitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 0%-33%

3. Partisipatif

baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator partisipatif telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 67%-100%

Cukup baik: Apabila hasil penelitian terhadap indikator partisipatif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 34%-66%

Kurang baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator partisipatif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 0%-33%

4. Tertib dan disiplin anggaran

baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator tertib dan disiplin anggaran pelaksana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 67%-100%

cukup baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator tertib dan disiplin anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 34%-66%

kurang baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator tertib dan disiplin anggaran telah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 0%-33%

Sedangkan untuk penilaian variabel adalah sebagai berikut :

baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator setelah terlaksana atau jawaban responden berada dalam skala 67%-100%

cukup baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator cukup dilaksanakan atau jawaban responden berada dalam skala 34%-66%

kurang baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator kurang dilaksanakan atau jawaban responden berada dalam skala 0%-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian ini ialah :

A. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini ialah tipe deskriptif, dengan analisa kuantitatif. Yaitu suatu penilaian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan bagaimana pengelolaan keuangan desa dalam program pembangunan di kampung Sengkemang kabupaten siak. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yaitu detail terhadap objek penelitian, sehingga akan ditemukan kejadian-kejadian relative dan diperoleh gambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Menurut sugiyono (2015:14) metode penelitian kuantitatif ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengumpulan sampel pada umumnya dilakukan secara random.

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian penulis mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan untuk menilai pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung sengkemang kecamatan koto gasib kabupaten siak penulis menggunakan cara

wawancara, kuisioner, dan observasi lapangan. Dimana data dan informasi yang diperoleh dijadikan alat pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya. Pada objek penelitian ini, peneliti dapat memperhatikan secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu (Sugiyono, 2015:215).

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Menurut sygiyono (2015:80) populasi adalah wilayah generakisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun sugiyono (2015:80) berpendapat bahwa populasi ialah pbjek/subjek yang berada pada suatu wilayah dan memnuhi syarat-syarat tertentu dengan masalah penelitian.

Adapun yang menjadi populasi di penelitian ini adalah perangkat desa, RT dan RW serta masyarakat berdasarkan tokoh masyarakat.

2. Sampel

Sampel ialah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Sujarweni (1014;65) sampel pada penelitian ini sebgagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian dan merupakan wakil dari populasi yang diteliti.

Tabel III.1 : jumlah sampel penelitian tentang pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung Sengkemang kecamatan koto gasib kabupaten siak

| No | Subjek | Populasi | Sampel | Persentase |
|----|------------------|----------|--------|------------|
| 1 | Penghulu kampung | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Kerani | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Kaur desa | 4 | 4 | 100% |
| 4 | Ketua dusun | 3 | 3 | 100% |
| 5 | Ketua RT | 8 | 8 | 100% |
| 6 | Ketua RW | 3 | 3 | 100% |
| 7 | Tokoh masyarakat | 12 | 6 | 50% |
| | Jumlah | 32 | 26 | 50% |

Sumber : Data penelitian, 2020

D. Teknik penarikan sampel

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Arikunto (2006) Purposive Sampling ialah teknik pengambilan sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah, atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Menurut Notoatmodjo (2010) mengartikan pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat, populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya.

Teknik penarikan purposive sampling ini diajukan untuk beberapa perangkat kampung Sengkemang. Selanjutnya untuk penghulu kampung sengkemang, peneliti menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Menurut Nanan untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penulis membagi ke 2 (dua) bagian yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden baik dengan kuisisioner maupun observasi. serta hasil penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara yang berkaitan dengan masalah penelitian, data responden seperti identitas responden, data tentang pengelolaan keuangan desa.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, catatan arsip, dokumen-dokumen segala bentuk informasi yang bersifat menunjang penelitian seperti profil keuangan Kampung Sengkemang, profil pembangunan kampung, laporan kegiatan, dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dokumen Pelaksanaan Anggaran.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi yaitu melakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data secara lisan atau melakukan tanya jawab secara langsung kepada pegawai yang jadi sampel dalam penelitian.
3. Angket/ kuisioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan tertulis pada responden dan akan dijawab juga secara tertulis oleh responden.
4. Dokumentasi yaitu mempelajari sejarah historis lokasi penelitian untuk diambil sebagai data pendukung dalam penelitian yang dimaksud.

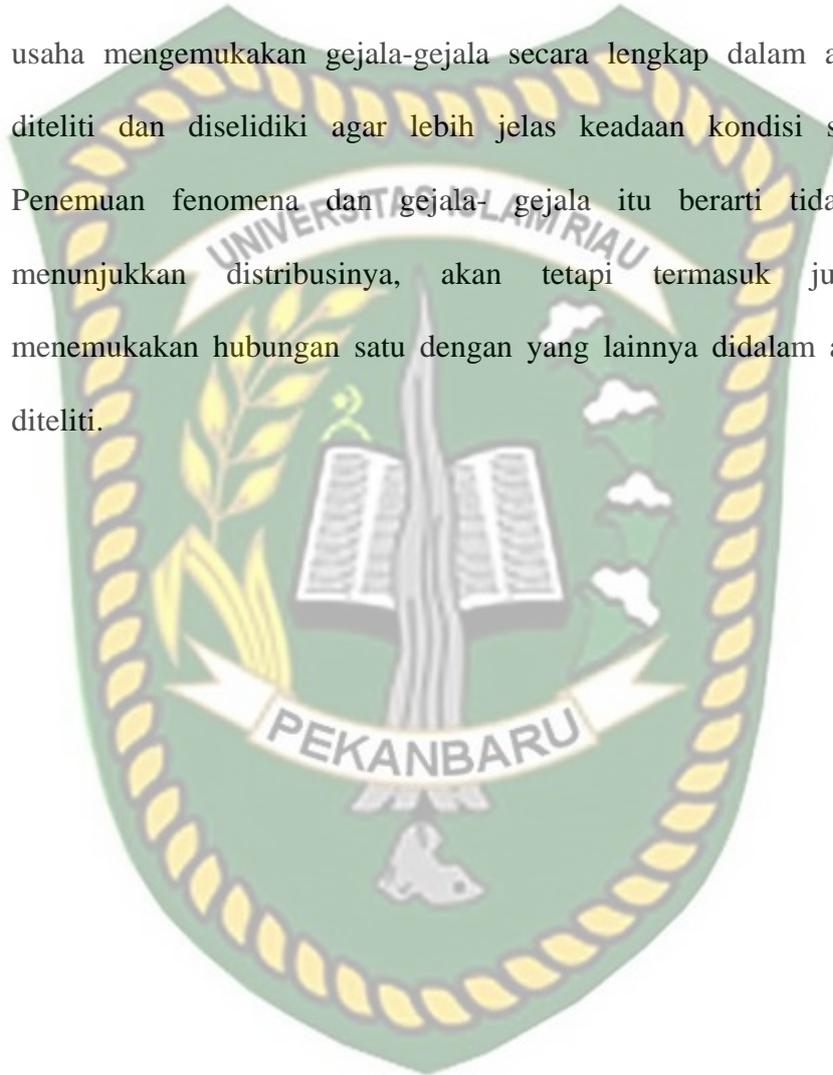
G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif, yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan fakta atau kenyataan dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat ditarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini menggunakan data-data yang berupa angka-angka. kemudian dianalisis setiap indikatornya dan analisa secara

menyeluruh untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang terjadi terkait dengan pengelolaan keuangan tersebut dilapangan.

Mendesripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diteliti dan diselidiki agar lebih jelas keadaan kondisi sebenarnya. Penemuan fenomena dan gejala-gejala itu berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk juga usaha menemukan hubungan satu dengan yang lainnya didalam aspek yang diteliti.



H. Jadwal kegiatan penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang pengelolaan keuangan desa dalam bidang pembangunan di kampung sengkemang kabupaten siak adalah sebagai berikut :

Tabel III.2 : jadwal waktu kegiatan penelitian tentang pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung Sengkemang kabupaten siak.

| No | Jenis kegiatan | Bulan dan minggu ke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|--|
| | | November | | | | desember | | | | januari | | | | februari | | | | maret | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Penyusunan UP | X | X | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar UP | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Revisi UP | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Revisi Kursioner | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Rekomendasi survey | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Survey lapangan | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 7 | Analisis data | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | |
| 8 | Penyusunan laporan hasil penelitian | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | |
| 9 | Konsultasi revisi skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | X | |
| 10 | Ujian konfhensif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| 11 | Revisi skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| 12 | Penggandaan skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas dan Gambaran Umum Kabupaten Siak

1. Keadaan Geografis

Kabupaten siak menjadi bagian dari Negara Kesatuan Indonesia sejak tahun 1999, sebelum itu Siak merupakan bagian dari kesultanan Siak Sri Indrapura.

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16'30'' LU – 020'49'' LS dan 100 54'21'' BT – 14'59'' BT. Secara fisik goeografis kabupaten siak memiliki kawasan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk ke dalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) Indonesia-malaysia-singapura. Bentang alam kabupaten siak sebagian daerahnya terdiri dari dataran rendah yang berada dibagian timur dan dataran tinggi yang berada dibagian barat. Struktur tanah yang ada di kabupaten siak umumnya berstruktur tanah podsolik merah kuning dan batuan dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan seperti ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25-32 celcius, dengan kelembapan dan curah hujan cukup tinggi.

Selain dikenal dengan sungai siak yang membelah wilayah kabupaten siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang

tersebar di beberapa wilayah kecamatan yang ada di kabupaten siak. Sungai siak sendiri merupakan sungai terdalam di Indonesia dengan kedalaman mencapai 30 m, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi terutama sebagai sarana transportasi perdagangan dan perhubungan. Sedangkan danau-danau yang tersebar di kabupaten siak antara lain danau air hitam, danau besi, danau ketialau, danau pulau bawah, danau pulau atas, danau tasik rawa, danau naga sakti, danau zamrud, danau tembatu songsang, dan danau pulau besar.

2. Profil Kabupaten Siak

Setelah resmi menjadi bagian dari Indonesia kini Kabupaten Siak Sri Indrapura memiliki 14 kecamatan yang terdiri dari 131 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Siak mencapai 8.556,09 km² dan jumlah penduduk 415.128 jiwa (2020).

Table IV.1 : kecamatan dan jumlah kelurahan yang ada di Kabupaten Siak

| NO | KECAMATAN | IBU KOTA | JUMLAH DESA/KELURAHAN |
|----|---------------|------------------|-----------------------|
| 1 | Koto Gasib | Pangkalan Pisang | 15 |
| 2 | Mempura | Sungai Mempura | 9 |
| 3 | Dayun | Dayun | 11 |
| 4 | Bunga Raya | Bunga Raya | 8 |
| 5 | Sungai Mandau | Muara Kelantan | 12 |
| 6 | Sungai Apit | Sungai Apit | 9 |
| 7 | Sabak Auh | Bandar Sungai | 11 |
| 8 | Pusako | Dusun Pusaka | 7 |
| 9 | Lubuk Dalam | Lubuk Dalam | 8 |
| 10 | Kerinci Kanan | Kerinci Kanan | 10 |
| 11 | Minas | Minas Jaya | 7 |
| 12 | Kandis | Telaga Sam-sam | 11 |
| 13 | Tualang | Perawang | 8 |
| 14 | Siak | Kampung Dalam | 5 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Sri Indrapura 2020

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak dan jumlah desa/kelurahan, lalu desa terbanyak disusul oleh kecamatan Koto Gasib dengan jumlah 15 desa/kelurahan, lalu desa terbanyak disusul oleh kecamatan Sungai Mandau dengan jumlah 12 desa/kelurahan. Sedangkan kecamatan yang memiliki desa yang paling sedikit dimiliki oleh kecamatan siak yang berjumlah 5 desa/kelurahan.

Tabel IV.2 : Luas wilayah Menurut Kecamatan Dikabupaten Siak

| No | Kecamatan | Luas (KM ²) |
|----------------|---------------|-------------------------|
| 1 | Koto Gasib | 704,70 |
| 2 | Mempura | 232,24 |
| 3 | Dayun | 155,09 |
| 4 | Bunga Raya | 437,45 |
| 5 | Sungai Mandau | 1.493,65 |
| 6 | Sungai Apit | 151,00 |
| 7 | Sabak Auh | 73,38 |
| 8 | Pusako | 544,47 |
| 9 | Lubuk Dalam | 343,60 |
| 10 | Kerinci Kanan | 1.705,00 |
| 11 | Minas | 346,35 |
| 12 | Kandis | 894,17 |
| 13 | Tualang | 128,66 |
| 14 | Siak | 1.346,33 |
| Kabupaten Siak | | 8.556,09 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Sri Indrapura 2020

Dari tabel IV.2 diatas, data diketahui bahwa luas wilayah masing-masing kecamatan di kabupaten siak ada 14 kecamatan yang ada yaitu keseluruhan wilayahnya berjumlah 8.556,09 km².

3. Profil kampung Sengkemang

a. Keadaan geografis kampung sengkemang

- a) Sebelah Utara : Kampung Rantau Panjang
- b) Sebelah selatan : Kampung Empang Pandan
- c) Sebelah Barat : Kampung Buatan II
- d) Sebelah Timur : Kampung Dayun/ L. Tilan

Kampung Sengkemng juga memiliki 3 dusun yaitu :

- a) Dusun lingkarpadi
 - b) Dusun paret senang
 - c) Dusun dharma bakti
- b. Keadaan social budaya

1. Kependudukan

Tabel IV.3 : jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Kampung Sengkemang

| No | Jenis kelamin | jumlah | Persentase (%) |
|----|---------------|--------|----------------|
| 1 | Laki-laki | 718 | 50,3% |
| 2 | Perempuan | 710 | 49,7% |
| | Jumlah | 1428 | 100% |

Sumber : RPJM kampung Sengkemang

Berdasarkan table diatas dilihat bahwa jumlah penduduk kampung sengkemang adalah sebanyak 1428 jiwa dengan penduduk jenis kelamin laki- laki berjumlah 718 jiwa dengan presentase 50,3% dan penduduk jenis kelamin perempuan berjumlah 710 jiwa dengan presentase 49,7%. Penduduk di kampung sengkemang jenis kelamin terbanyak yaitu laki-laki

Tabel IV. 4: jumlah penduduk berdasarkan agama kampung Sengkemang

| No | Agama | Jumlah | Persentase (%) |
|--------|----------|--------|----------------|
| 1 | Islam | 1417 | 99,2% |
| 2 | Katholik | - | - |
| 3 | Kristen | 11 | 8% |
| 4 | Hindu | - | - |
| 5 | Budha | - | - |
| Jumlah | | 1428 | 100% |

Sumber : monografi kampung sengkemang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat kampung sengkemang menganut hanya dua macam agama yaitu islam dan kristen. Dengan ini dapat dilihat mayoritas penduduk kampung sengkemang beragama islam dengan jumlah 1417 jiwa dengan presentase 99,2%.

2. Mata pencaharian pokok

Secara umum mata pencaharian pokok masyarakat kampung sengkemang dapat teridentifikasi dalam beberapa bidang mata pencaharian, diantaranya :

Tabel IV.5 : jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian kampung sengkemang

| No | Jenis pekerjaan | Jumlah | Persentase (%) |
|----|---------------------|--------|----------------|
| 1 | Petani/tani | 238 | 41% |
| 2 | Pedagang | 15 | 3% |
| 3 | PNS | 11 | 2% |
| 4 | Guru | 15 | 3% |
| 5 | Bidan/perawat | 1 | 0,2% |
| 6 | Pensiunan | 2 | 0,3% |
| 7 | Swasta | 122 | 22% |
| 8 | Tukang | 12 | 2% |
| 9 | TNI/Polri | 1 | 0,2% |
| 10 | Sopir atau angkutan | 15 | 3% |
| 11 | Buruh | 131 | 23,3% |
| | | 563 | 100% |

Sumber : monografi kampung sengkemang

Dari tabel dapat kita lihat bahwa mata pencaharian pokok masyarakat di kampung sengkemang sangat beragam. Dan yang paling banyak masyarakat mempunyai mata pencaharian di bidang petani dengan jumlah 238 jiwa dengan presentase sebanyak 41%. Dari keseluruhan 563 jiwa.

4. Visi misi kampung sengkemang

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kampung Sengkemang Berbudaya, Bersatu dan Bermarwah“

Misi

- a. Penataan yang baik sistem manajemen Pemerintahan dengan memfungsikan struktural terbawah seperti RT,RK untuk melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya.
- b. Mempertahan system dan personal yang baik serta membenahi kinerja Pemerintahan yang kurangbaik sekarang ini.
- c. Memberikan wewenang penuh kepada bagian-bagian urusan baik Pemerintah pembangunan dan kesejahteraan untuk bekerja melaksanakan tupoksinya masing-masing sehingga tercipta pelayanan terhadap masyarakat yang efektif dan memuaskan.
- d. Mendengarkan keluhan masyarakat tentang pelayanan Pemerintah serta memonitor kinerja Perangkat Kampung dan bawahan lainnya agar bekerja sesuai dengan aturan dan undang-undang

B. Tugas dan fungsi Pemerintahan kampung

a. Pemerintahan kependudukan, tugas dan fungsi organisasi kampung

1. Penghulu kampung

Kedudukan dan tugas kepala desa/penghulu menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 yakni kepala desa berkedudukan sebagai pemerintah di desa, yang berada langsung dibawah bupati dan bertanggung jawab kepada bupati melalui camat. Kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melakukan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berwenang :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
- 4) Menetapkan peraturan desa
- 5) Menetapkan APBDes
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa
- 7) Membina ketentraman dan keterlibatan masyarakat desa
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktifitas untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 11) Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa memanfaatkan teknologi tepat guna
- 12) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 13) Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjukkuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- 14) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, kepala desa berhak :

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
- 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa

2. Kerani

Merupakan perangkat desa yang bertugas :

- 1) membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa,
 - 2) mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa
 - 3) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes
 - 4) menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
 - 5) menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
 - 6) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes
3. kepala urusan keuangan (KAUR keu)

Tugas kaur keuangan adalah membantu kerani dalam melaksanakan pengelolaan sumber endapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDes, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa, sedangkan fungsinya ialah :

- 1) mengelola administrasi keuangan desa
- 2) mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa
- 3) membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
- 4) melakukan tugas lain yang diberikan kerani

4. kepala urusan umum (KAUR Umum)

Tugas dari kaur umum adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan social kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya yaitu :

- 1) menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan
 - 2) menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama
 - 3) menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan social kemasyarakatan
 - 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa
5. kepala urusan pemerintahan

Tugas kaur pemerintahan adalah membantu kepala desa dan kerani dengan tugas:

- 1) membantu kegiatan administrasi keendudukan dan catatan sipil
 - 2) membantu kegiatan pertanahan
 - 3) pencatatan monografi desa
 - 4) penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan desa
 - 5) tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
6. kepala urusan pembangunan

Tugas kaur pembangunan adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah :

- 1) menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan
 - 2) melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
 - 3) mengelola tuhas pembantuan
 - 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
 - 5) tugas-tugas lain yang diberikan atasan
7. kepala dusun (KADUS)

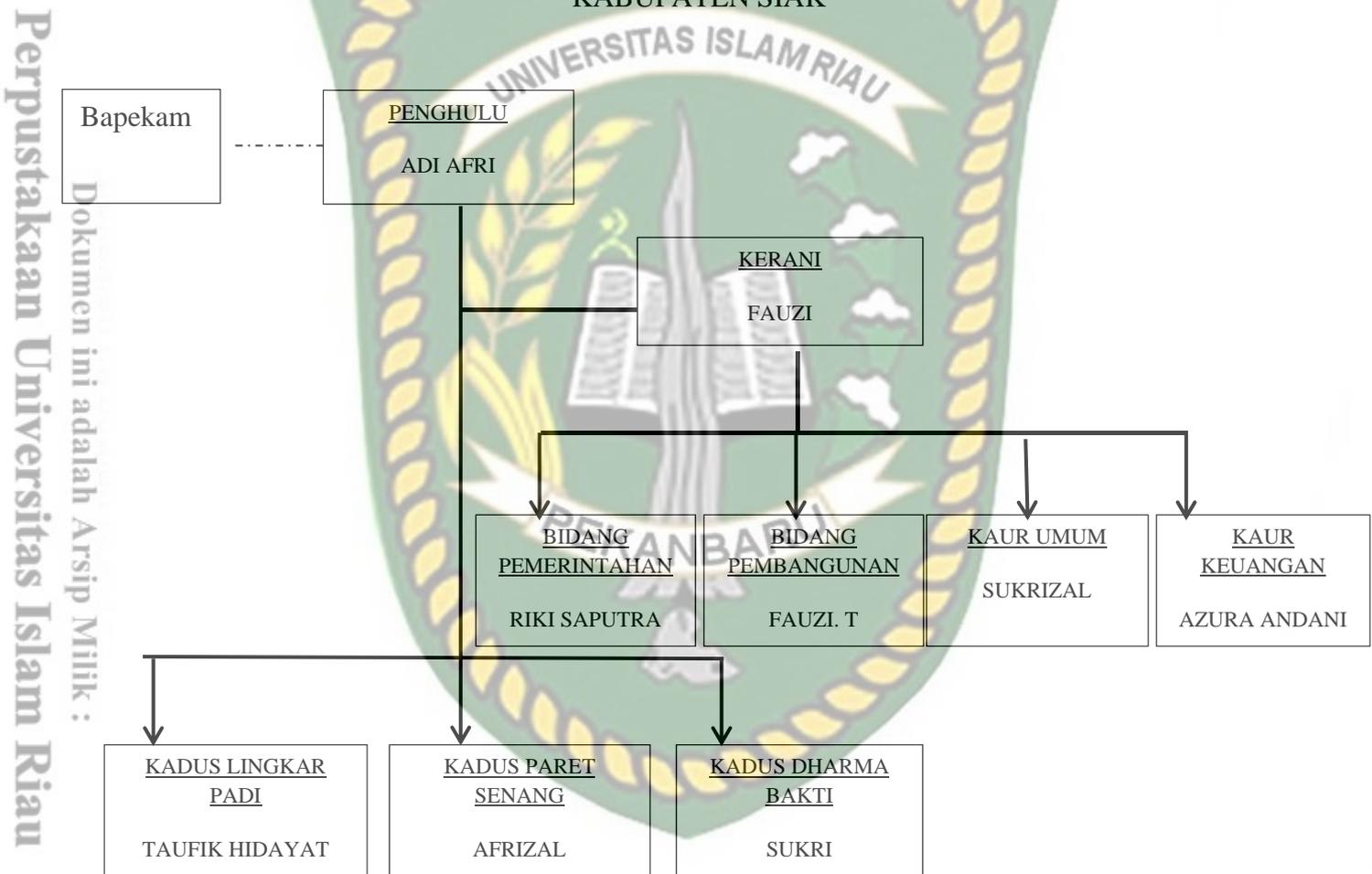
Tugas kadus adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kadus :

- 1) membantu pelaksana tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan
- 2) melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- 3) melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa
- 4) membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga
- 5) membina swadaya dan gotong royong masyarakat
- 6) melakukan penyuluhan program pemerintahan desa
- 7) sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

C. Struktur Organisasi

Gambar I.2 : struktur organisasi pemerintahan kampung sengkemang kecamatan Koto gasib kabupaten siak

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
KAMPUNG SENGKEMANG KECAMATAN KOTO GASIB
KABUPATEN SIAK



Sumber : kantor kampung sengkemang

Struktur organisasi pemerintah kampung sengkemang merupakan perangkat desa yang telah bertugas dari tahun 2017. Yang mana saat ini pemerintahan kampung sengkemang dipimpin oleh bapak Adi Afri. Bahkan untuk penghulu kampungnya sudah menjabat selama 2 periode.

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Identitas Responden

Responden penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini berjumlah 26 orang, yaitu 1 orang penghulu kampung, 1 orang kerani, 2 orang kaur, 2 orang juru tulis, 3 orang kadus, 3 orang RK, 8 orang RT, dan 6 orang tokoh masyarakat. Identitas responden berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia responden.

1. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin dalam penelitian pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung sengkemang kecamatan koto gasib kabupaten siak terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan dalam bekerja dimana biasanya pria lebih cepat emosional dari pada wanita. Untuk lebih jelas mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel V.1 : distribusi identitas responden penelitian pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung sengkemang kabupaten siak berdasarkan jenis kelamin

| No | Jenis kelamin | Jumlah responden | Presentasi |
|--------|---------------|------------------|------------|
| 1 | Laki-laki | 25 | 97% |
| 2 | Perempuan | 1 | 3% |
| Jumlah | | 26 | 100% |

Sumber : data penelitian 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden dalam penelitian pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung sengkemang kecamatan koto gasib kabupaten siak terdiri dari 25 orang jenis kelamin laki-laki dan 1 orang jenis kelamin perempuan. Dari uraian tersebut terlihat jenis didominasi oleh laki-laki yaitu dengan presentasi 97%.

2. Tingkat Pendidikan

Pada identitas responden tingkat pendidikan dalam penelitian pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung sengkemang kecamatan koto gasib kabupaten siak terdiri dari tiga tingkat pendidikan yaitu SD, SLTP, dan SLTA. Tingkat pendidikan juga memengaruhi kemampuan dan pola pikir seseorang. Tingkat pendidikan memberikan isyarat terhadap pelaksanaan kemampuan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya. Baik informan atau responden yang tingkat pendidikannya relatif rendah mungkin akan sulit melaksanakan tugasnya dengan baik, begitu pulak sebaliknya. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.2 : distribusi identitas responden penelitian pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung sengkemang kabupaten siak berdasarkan tingkat pendidikan

| No | Tingkat pendidikan | Responden | Presentase |
|--------|--------------------|-----------|------------|
| 1 | SD | 6 | 24% |
| 2 | SLTP | 10 | 38% |
| 3 | SLTA | 10 | 38% |
| Jumlah | | 26 | 100% |

Sumber : data penelitian 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung sengkemang kabupaten siak dari paling sedikit adalah tingkat pendidikan SD ada 6 orang dengan presentase 24%, dan tingkat pendidikan SLTA/SMA ada 10 orang sebanding dengan SLTP/SMP dengan presentase 38%. Dari keseluruhan responden yang ada di kampung sengkemang berjumlah 26 orang. Dan dari 6 orang yang tamatan SD adalah dari kalangan tokoh masyarakat ini perlu diperhatikan juga pemerintah setempat untuk lebih meningkatkan pendidikan tokoh masyarakat tersebut agar semua permasalahan yang ada ditingkat desa bisa diselesaikan secara mudah dan tuntas. Sedangkan yan menjalankan tugas dari pengelolaan keuangan desa ini berada pada tingkat pendidikan tertinggi yaitu SMA. Dimana latar belakang dari pendidikan juga sangat mempengaruhi jalannya suatu pembangunan dan pemerintahan. Dengan hasil distribusi tingkat pendidikan di atas sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan dengan baik, karena pendidikan formal yang diperoleh seseorang menunjukkan pola pikir dalam menghadapi masalah. Selain pendidikan yang dimiliki seseorang, pengalaman juga sangat

menentukan keputusan yang diambil dalam menjalankan roda pemerinthan. Wajar saja jika pengelolaan keuangan di desa Sengkemang ini masi kurang maksimal, karena tingkat pendidikan sangat mempengaruhi suatu keputusan dan roda pemerintahan. Tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan desa dalam mengelola keuangan sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam kekuasaan.

3. Tingkat Usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan sesornq dalam bertindak dan berpikir dalam rangka mengambil suatu keputusan. Biasanya yang berumur lebih tua akan cenderung bekerja dan berpikir lebih matang karena telah memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel V.3 : distribusi identitas responden penelitian pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung sengkemang kabupaten siak berdasarkan tingkat usia

| No | Tingkat usia | responden | Persentase |
|--------|--------------|-----------|------------|
| 1 | 20-30 | 2 | 8% |
| 2 | 31-41 | 9 | 34% |
| 3 | 42-52 | 9 | 34% |
| 4 | 53-63 | 4 | 16% |
| 5 | 64-74 | 2 | 8% |
| Jumlah | | 26 | 100% |

Sumber : data penelitian 2022.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung sengkemang kabupaten siak yang berada pada tingkat usia

20 – 30 tahun berjumlah 2 orang dengan presentase 8% dan tingkat usia 31 – 41 tahun serta 42 – 52 tahun masing-masing berjumlah 9 orang dengan presentase 34% dan tingkat usia 53 – 63 tahun berjumlah 4 orang dengan presentase 16% dan tingkat usia 64 – 72 tahun berjumlah 2 orang dengan presentase 8%. Usia memberikan isyarat terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa dengan baik. Usia muda akan mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal dibandingkan usia lebih tua, terkadang terkendala karena umur yang sudah lanjut. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh ketahanan fisik. Dalam kategori ini aparat pemerintahan desa cenderung memiliki usia tua.



B. Hasil Penelitian Pengelolaan Keuangan Desa Bidang Pembangunan Di Kampung Sengkemang Kabupaten Siak

Pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam. Namun fakta yang penulis temukan di lapangan masih menemukan beberapa fenomena dan dijawab dengan hasil penelitian yang menggunakan dan ada 4 indikator transparansi, akuntabelitas, partisipatif dan tertib dan disiplin anggaran.

1. Transparasi

Transparasi dalam penyusunan keuangan desa merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam mewujudkan tujuan organisasi diperlukan keterbukaan dalam setiap proses pengelolaan keuangan. Sehingga masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran desa yang menyangkut kepentingan bersama. Transparasi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan efektifitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-ihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparasi pengelolaan keuangan publik yang merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparasi tersebut pihak akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual.

Juga dijelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2004 tentang desa pasal 77 yang membahas tentang asas kekayaan milik desa dilaksanakan dengan asas keterbukaan atau transparasi.

Dalam prinsip pengelolaan anggaran keuangan desa transparansi mencakup unsur-unsur tentang di undang-nya sejumlah tokoh masyarakat, rapat dilaksanakan secara terbuka, keterbukaan informasi terhadap masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

Untuk mengetahui lebih jelas transparansi dalam evaluasi pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di Kampung Sengkemanag dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bidang Pembangunan Di Kampung Sengkemanag Kabupaten Siak

| No | Item yang dinilai | Kategori penilaian | | | jumlah |
|------------|--|--------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup baik | Kurang baik | |
| 1 | Kemudahan informasi tentang keuangan desa | 8 | 16 | 2 | 26 |
| 2 | Sarana dan prasarana informasi tentang keuangan desa | 18 | 7 | 1 | 26 |
| 3 | Ketertiban dalam penggunaan keuangan desa | 10 | 13 | 3 | 26 |
| Jumlah | | 36 | 36 | 6 | 78 |
| Rata-rata | | 12 | 12 | 2 | 26 |
| Presentase | | 46% | 46% | 8% | 100% |

Sumber : data olahan peneliti 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa mengenai pengelolaan keuangan desa pada indicator transparansi tentang keuangan desa yang menjawab baik berjumlah 36 responden dengan rata-rata 12 dan presentase 46% , Cukup baik berjumlah 36 responden dengan rata-rata

12 dan presentase 46% dan kurang baik berjumlah 6 responden dengan rata rata 2 dan presentse 8%.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai transparansi, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kemudahan informasi

Kemudahan informasi menjadi item penilaian yang sangat penting untuk bisa tercapainya transparansi. dengan mudahnya akan akses untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan akan membuat masyarakat lebih mudah mengawasi pelaksanaan keuangan desa ini.

Untuk menghindarinya kesalah pahaman dari masyarakat maka harus ada upaya dari pemerintah desa untuk tidak mempersulit masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai keuangan desa.

Pada item penilaian kemudahan informasi untuk kategori baik, peneliti mendapatkan jawaban sebanyak 8 orang responden dengan alasan karena disetiap informasi keuangan yang masuk selalu disampaikan di musyawarah dan ditempel dibaliho APBDes. Dan mendapatkan 16 orang responden untuk kategori cukup baik dengan alasan informasi yang didapatkan oleh masyarakat hanya melalui rapat musyawarah dimana tidak semua masyarakat yang datang . Dan sedangkan untuk kategori kurang baik peneliti mendapatkan jawaban 2 responden dengan alasan rincian apbdes

hanya gambaran besarnya saja, masyarakat tidak mengetahui detail anggaran tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan kerani kampung sengkemang. Beliau mengatakan :

“ itu selalu melalui musyawarah baik melalui RT/RK kepala dusun dan juga Pemerintahan kampung, biasanya diumumkan oleh pemerintahan desa dalam musyawarah kadang diumumkan secara lisan ke tingkat RT/RK jadi masyarakat yang jarang ke kantor desa bisa tau tentang eruntungan dana desa ini”

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Bendahara desa yaitu ibu Azura Andani. Beliau mengatakan:

“ya kami selaku pemerintah kampung akan memberikan akses yang seluas-luasnya informasi tentang keuangan desa, jika ada yang meminta atau menanyakan kami harus memberikan karena dana desa ini sifatnya sensitif, kalau untuk kemudahan informasi menurut saya sudah sangat mudah masyarakat untuk melihatnya karena selalu kami printkan didepan ada papan informasi, dan ada baliho juga. Dan yang kami lampirkan pun rasanya sudah sangat rinci”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk kemudahan informasi tentang keuangan desa di kampung sengkemang perangkat desa menyampaikan informasi melalui RT, RK, dan kadus sebagai perantara ke masyarakat. Pihak pemerintah desa telah memberikan dan memudahkan masyarakat kampung Sengkemang untuk mendapatkan informasi dan dapat dikatakan cukup mudah dari pengakuan pemerintah kampung.

Namun menurut observasi yang penulis lakukan di lapangan informasi ini masih kurang tersampaikan kepada masyarakat secara baik dan mengenai print out keuangan desa

hanya ada di baliho saja. Tidak ada di papan informasi seperti yang dijelaskan diatas. Jadi untuk item penilaian kemudahan informasi penulis sepakat bahwa untuk mendapatkan informasi tentang keuangan desa di kampung sengkemang cukup baik.

b. Sarana dan prasarana informasi

Sarana dan prasarana juga menjadi tolak ukur untuk mewujudkan pengelolaan yang transparasi, dengan adanya sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendapatkan informasi kita dapat melihat apakah pemerintah desa telah berupaya memberi akses untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Pada item penilaian sarana dan prasarana informasi untuk kategori baik, peneliti mendapatkan jawaban sebanyak 18 orang responden dengan alasan karena di adakan pengumuman-pengumuman dan secara tertulis melalui baliho dan papan pengumuman. Dan mendapatkan 7 orang responden untuk ketegori cukup baik dengan alasan sarana dan prasarana untuk informasi selalu tersedia sebelum dilaksanakan. Dan sedangkan untuk kategori kurang baik peneliti mendapatkan jawaban 1 responden dengan alasan belum terealisasinya website kampung dimana dengan adanya website maka masyarakat akan mudah mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa ini.

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Fauzi sebagai kerani sengkemang yang mengatakan :

“itu cukup baik terutama kami dipemerintahan kampung selalu berbagi dengan RT, RK, kadus jadi disitu nanti RT, RK, Kadus yang menyampaikan arahan-arahan nya kepada masyarakat”

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Azura Andani selaku Bendahara kampung Sengkemang yang mengatakan :

“ untuk sarana pra sarana dari pemerintah desa ketika ada yang menyanyakan mengenai keuangan desa atau dana desa ini kami sapaikan secara langsung, tapi juga ada baliho yang dapat kita lihat didepan kantor kita ini, namun untuk website kampung itu masih belum terealisasi pembuatannya”

dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sarana dan prasarana penyampaian informasi tentang keuangan desa, pemerintah desa telah membuat baliho. Namun pada pembuatan website kampung belum terealisasi.

c. Keterbukaan dalam penggunaan keuangan desa

Dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan asas transparasi. Keterbukaan dalam penggunaan keuangan desa harus dijalankan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi kepada masyarakat.

Pada item penilaian keterbukaan dalam penggunaan keuangan desa untuk kategori baik, peneliti mendapatkan jawaban

sebanyak 10 orang responden dengan alasan pemerintah kampung selalu menginformasikan kepada masyarakat baik melalui musyawarah maupun melalui papan informasi. Dan mendapatkan 13 orang responden untuk kategori cukup baik dengan alasan penyampaian informasi dilakukan pada musyawarah dan yang mendapatkan informasi secara detail hanya orang-orang yang datang pada saat musyawarah. Dan sedangkan untuk kategori kurang baik peneliti mendapatkan jawaban 3 responden dengan alasan yang mengetahui detail dari anggaran hanya perangkat desa saja .

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fauzi selaku Kerani kampung sengkemang, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

“ iya Alhamdulillah, sungguh sangat terbuka terutama dengan adanya permusyawaratan tadi melalui perangkat kampung sampai ke RT RK. Jadi yang terlibat didesa atau dikampung tadi menyampaikan kepada masyarakat.”

Penulis selanjutnya melakukan wawancara dengan ibu Azura Andani selaku Bendahara Kampung Sengkemang, yang mengatakan :

“untuk keterbukaan dalam penggunaan dana desa pemerintahan desa sudah cukup terbuka karena rincian-rincian pengelolaan sudah di sampaikan kepada masyarakat melalui rapat musyawarah dan sudah disampaikan di papan informasi”

Jadi dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sengkemang cukup terbuka untuk masalah penggunaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Adi Afri selaku penghulu kampung sengkemang yang telah peneliti lakukan di lapangan, beliau mengatakan :

“ kalau masalah keuangan desa itu kita sampaikan secara transparan kepada masyarakat, ketansparanan itu bisa kami sampaikan melalui informasi publik yang ada dipapan apbdes yang ada didepan kantor desa kito untuk penyampaian informasinya tentang pembangunan, pemberdayaan segala macam itu kito sampaikan melalui itu. Kemudian yang kedua bisa jugo kito sampaikan melalui tiap-tiap kali rapat, tiap-tiap kali pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat kito.”

Kesimpulan dari wawancara diatas untuk indikator transparasi disimpulkan bahwa untuk sarana dan prasarana penyampaian informasi untuk mencapainya sebuah trasparasi tentang pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa telah membuat baliho, menempelkan informasi keuangan desa di papan informasi namun pada pembuatan website kampung belum terlaksana.

Namun dari hasil observasi dilapangan hanya ada baliho didepan kantor desa dan tidak ditemukan di papan informasi hasil print out tentang pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan penghulu kampung, kerani dan bendahara kampung dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indicator transparasi dalam penelitian evaluasi pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung sengkemang kecamatan koto gasib kabupaten siak berada pada kategori penilaian “baik” dengan jumlah rata-rata 36 (46%). Sesuai

dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34%-66% masuk kategori cukup baik.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan usaha instansi pemerintah dalam memperoleh kepercayaan dari masyarakat dengan memperlihatkan umpan balik sebagai wujud pelayanan atas penghasilan yang diberikan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik ialah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo,2002). Akuntabilitas dalam penelitian ini adalah seluruh program atau kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun secara administrasi.

Dalam undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa asas pengelolaan kekayaan desa salah satu nya adalah akuntabilitas.

Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bidang Pembangunan Di Kampung Sengkemang Kabupaten Siak

| No | Item yang dinilai | Kategori penilaian | | | Jumlah |
|------------|--|--------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup baik | Kurang baik | |
| 1 | Pertanggung jawaban yang disampaikan kepada masyarakat | 10 | 13 | 3 | 26 |
| 2 | Kelengkapan administrasi penunjang akuntabilitas | 10 | 15 | 1 | 26 |
| Jumlah | | 20 | 28 | 4 | 52 |
| Rata-rata | | 10 | 14 | 2 | 26 |
| Presentase | | 38% | 54% | 8% | 100% |

Sumber : data olahan peneliti 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa mengenai pengelolaan keuangan desa pada indikator akuntabilitas tentang keuangan desa yang menjawab baik berjumlah 20 responden dengan rata-rata 10 dan presentase 38% , Cukup baik berjumlah 28 responden dengan rata-rata 14 dan presentase 54% dan kurang baik berjumlah 4 resonden dengan rata rata 2 dan presentse 8%.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait indikator akuntabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bentuk pertanggungjawaban

Bentuk pertanggungjawaban juga menjadi tolak ukur yang ditetapkan enulis untuk melihat sejauh mana asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di kampung sengkemang.

Dengan melihat bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah pihak masyarakat sebagai pengawas jalannya pengelolaan keuangan desa bisa menilai apakah pemerintah desa sanggup mempertanggungjawabkan setiap tindakan atau kebijakan yang dibuat ketika pengelolaan keuangan desa ini.

Pada item penilaian bentuk pertanggungjawaban untuk kategori baik, peneliti mendapatkan jawaban sebanyak 10 orang responden dengan alasan karena di setiap akhir tahun selalu di informasikan kepada masyarakat telah disampaikan laporan atau rekap realisasi melalui papan informasi. Dan mendapatkan 13 orang responden untuk ketegori cukup baik dengan alasan laporan pertanggungjawaban juga kadang mengalami terlambatan. Dan sedangkan untuk kategori kurang baik peneliti mendapatkan jawaban 3 responden dengan alasan masih kurangnya sumber daya dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Fauzi selaku kerani kampung sengkemang, yang mengatakan :

“itu tergantung bagaimana keuangan yang masuk setelah ditarik uangnya itu wajib kami membuat laporan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bendahara kampung, yang mengatakan:

“ kalau itu biasanya memang kami sampaikan diakhir tahun, melalui LPJ. K ketika masyarakat nantinya bertanya keuangan ini habis nya dimana kami ada, bukan hanya

secara lisan, namun juga secara administrative kami lengkap. Kami biasanya menyampaikan melalui musyawarah yang mana di lakukan setiap tahun. Selain itu juga ad diprintkan dipapan informasi, jika ada moment\ tententu kami sampaikan disitu”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa untuk bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat cukup baik, dibuktikan dengan apa yang disampaikan informan terkait bahwa pertanggungjawaban selalu disampaikan diakhir tahun pada musyawarah desa melalui LPJ. Yang mana sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dan juga ada upaya dari pemerintah desa untuk menyampaikan secara lisan keada masyarakat melalui rapat musyawarah desa. Selain itu dari keterangan mereka juga menempelkan printan pada papan informasi. Namun observasi penulis dilapangan di papan informasi tidak ada printan yang terkait tentang pengelolaan keuangan desa.

b. Kelengkapan administrasi

Kelengkapan administrasi adalah bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas administrasi. dengan terpenuhinya kelengkapan administrasi seperti surat-surat penting dan dokumen laporan dalam pengelolaan keuangan desa ini. Ini digunakan jika suatu saat nanti ada dari beberapa pihak terkait meminta pertanggungjawaban berupa administrasi fisik.

Pada item penilaian kelengkapan administrasi untuk kategori baik, peneliti mendapatkan jawaban sebanyak 10 orang responden dengan alasan karena setiap penganggaran sudah

dicermati bersama-sama untuk kelengkapan administrasinya setelah kegiatan terealisasi. Dan mendapatkan 15 orang responden untuk kategori cukup baik dengan alasan. Dan sedangkan untuk kategori kurang baik peneliti mendapatkan jawaban 3 responden dengan alasan jaringan yang ada selalu lelet dan menyebabkan administrasi pengelolaan keuangan desa di kampung sengkemang agak terganggu.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Fauzi selaku Kerani Kampung Sengkemang, yang mengatakan :

“adm itu sangat penting. Itu adalah bukti dari pada kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan terutama kalau ada dia dibidang pembangunan itu harus ada hibah dari pada lahan juga sudah ada foto-foto , kwitansi, dan lain sebagainya untuk pendukunng”

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan ibu Azura Andani selaku Bendahara yang mengatakan :

“untuk berkas-berkas administrasi tentang keungan desa insya allah kami lengkap, bisa di cek. Kami selalu pegang itu jaga jaga nanti ada masyarakat yang mau bertanya, karena kami selalu terbuka terhadap kritik dan masukan dari warga tentang keuangan desa”

Dari wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk kelengkapan administrasi penunjang akuntabilitas pemerintah desa cukup baik.dapat dibuktikan dengan setiap data yang diminta oleh penulis selalu diberikan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Adi Afri selaku penghulu kampung sengkemang yang telah peneliti lakukan di lapangan, beliau mengatakan :

“laporan pertanggungjawaban kito setiap tahun diminta pertanggungjawaban melalui pemerintahan daerah melalui ekspetorat kabupaten siak. Jadi kito melaporkan semuo pertanggungjawaban keuangan-keuangan desa itu melalui ekspetorat kabupaten setiap tahun. Untuk laporan-laporan administrasi penduduk itu kita ado laporan kekecamatan.kalau masalah kelengkapan administrasi inysaallah itu sudah kito persiapkan, karna kan dari dana desa ko kito tidak bisa kito sembarang-sembarangan, satu jenis ajo tetap harus ado buktinyo baik kwintansi faktur dan lain sebagainya gitu”.

Dari hasil semua wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk akuntabilitas tentang keuangan desa dikampung sengkemang penulis sepakat bahwa untuk indikator akuntabilitas tentang keuangan desa di kampung sengkemang cukup baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan penghulu kampung, kerani dan bendahara kampung dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indicator akuntabilitas dalam penelitian evaluasi pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung sengkemang kecamatan koto gasib kabupaten siak berada pada kategori penilaian “cukup baik” dengan jumlah rata-rata 14 (54%). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34%-66% masuk kategori cukup baik.

3. Partisipatif

Partisipatif ialah dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan memiliki hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat

dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung atau tidak langsung (sujarweni, 2015)

Partisipatif mengandung makna bahwa pengambilan keputusan proses pengelolaan anggaran dana desa sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat.

Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa asas pengelolaan keuangan desa salah satunya adalah partisipatif, dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat.

Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Partisipatif Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bidang Pembangunan Di Kampung Sengkemang Kabupaten Siak

| No | Item yang dinilai | Kategori penilaian | | | Jumlah |
|------------|---|--------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup baik | Kurang baik | |
| 1 | Sarana dan masukan masyarakat | 17 | 8 | 3 | 26 |
| 2 | Tingkat keterlibatan masyarakat dalam musrembangdes | 15 | 8 | 1 | 26 |
| Jumlah | | 32 | 16 | 4 | 52 |
| Rata-rata | | 16 | 8 | 2 | 26 |
| Presentase | | 61% | 31% | 8% | 100% |

Sumber : data olahan peneliti 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa mengenai pengelolaan keuangan desa pada indikator partisipatif tentang keuangan desa yang menjawab baik berjumlah 32 responden dengan rata-rata 16 dan presentase 61% , Cukup baik berjumlah 16 responden dengan rata-rata

8 dan presentase 31% dan kurang baik berjumlah 4 responden dengan rata rata 2 dan presentse 8%.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dilapangan mengenai partisipasi dengan infoman peneliti, maka dapat dijelaskan seperti berikut :

a. Saran dan masukan masyarakat

Saran dan masukan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangat perlu untuk diperhatikan. Saran dan masukan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas masukan pada saat dilaksanakan saat musrembang desa. Karena partisipasi dapat juga diartikan sebagai yang memiliki aspirasi yang perlu dipertimbangkan dalam proses pelaksanaan program pembangunan.

Pada item penilaian saran dan masukan masyarakat untuk kategori baik, peneliti mendapatkan jawaban sebanyak 17 orang responden dengan alasan sangat di terima dengan baik karena anggaran dan ide-ide masyarakat itulah yang dijadikan landasan menunjang kemajuan kampung sengkemang. Dan mendapatkan 8 orang responden untuk ketegori cukup baik dengan alasan setiap menyusun rencana pembangunan di kampung sengkemang pemerintah desa juga mengundang masyarakat tertentu melalui musyawarah kampung. Dan sedangkan untuk kategori kurang baik

peneliti mendapatkan jawaban 3 responden dengan alasan hanya sebagian saran yang dapat ditampung dalam musrembang desa.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan bapak

Fauzi selaku kerani kampung sengkemang, yang mengatakan :

“itu sangat antusias karna mereka selalu mengawal dari pada apa keinginan yang ingin dibuat dikampung”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ibu

Azura selaku Bendahara. Yang mengatakan :

“secara kuantitas sangat banyak masukan banyak dari masyarakat, antusias nya sangat tinggi. Karena masyarakat kampung sengkemang ini sangat peduli pada perkembangan desa. Mereka pengen tau apa saja yang akan dibangun didesa dan apa saja yang dikelola desa. Dan masuka dari masyarakat cukup berkualitas, Cuma kami sekarang ini terkendala pendanaan,saran dan masukan kebanyakan masih seputaran pembangunan fisik seperti jalan rusak, pembangunan box culvert dan lain-lain”

Dari hasil wawancara diatas data dilihat bahwa menurut pemerintah kampung sengkemang masyarakat sangat aktif dalam menyampaikan saran dan masukan dalam musrembang desa, dan diakui oleh emerintah desa bahwa untuk kualitas masukan dan saran dari masyarakat masih seputaran pembnagunan fisik saja.

Dengan hasil observasi yang penulis lakukan untuk jumlah dan saran dan masukan masyarakat sangat baik namun saran dan masukan yang disampaikan hanya seputaran pembangunan fisik semata.

b. Keterlibatan masyarakat

Keterlibatan masyarakat ialah kesediaan seseorang untuk membantu kegiatan seperti pembangunan di daerah, sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam pelaksanaannya dapat terjadi diantara sesama warga, dapat pula terjadi diantara atasan dengan bawahan atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan kelompok pemerintah. Partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat berarti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan atau menunjukkan prioritas.

Melibatkan masyarakat pada proses pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan dalam setia tahaan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pada musrembang desa.

Pada item penilaian keterlibatan masyarakat untuk kategori baik, peneliti mendapatkan jawaban sebanyak 15 orang responden dengan alasan masyarakat di kampung sengkemang antusias dalam musrembang yang diselenggarakan oleh pemerintahan kampung sengkemang. Dan mendapatkan 8 orang responden untuk kategori cukup baik dengan alasan tidak semua masyarakat yang sudah di undang itu ikut berpartisipasi berbicara pada saat musyawarah. Dan sedangkan untuk kategori kurang baik peneliti mendapatkan jawaban 1 responden dengan alasan tidak semua masyarakat

menghadirinya karena yang diundang hanya masyarakat tertentu perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Fauzi selaku Kerani Kampung Sengkemang. Yang mengatakan :

“sungguh sangat mengikuti. Karna dari situla dapat nanti untuk disusun apa-apa yang akan dibangun ada perencanaan kedepannya”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ibu Azura Andani selaku Bendahara Kampung Sengkemang. Yang mengatakan :

“keterlibatan masyarakat desa dalam musrembang desa bisa dibilang tidak naik tidak turun dari tahun ke tahun, karena yang diundang untuk musrembang desa hanya unsur-unsur tertentu saja, jadi tidak seluruh masyarakat desa yang diundang”

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan perangkat desa untuk keterlibatan masyarakat dalam musrembang ini diwakilkan oleh orang-orang tertentu yang terlibat di suatu lembaga. Namun penulis meyakini adanya indikasi bahwa masyarakat kurang dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara bapak penghulu kampung sengkemang yang telah peneliti lakukan di lapangan, beliau mengatakan :

“penyusunan APBDesa kampung itu ABDesnyo kito buat setiap persatu tahun sekali kito buat penyusunan itu petamo kali penyusunan level internal, istilahnyo kawan-kawan di pemerintahan setelah itu baru kito libatkan dengan Bapekam (Badan Permusyawarahan Kampung) kemudian nanti kito sampaikan diumum dalam rapat-rapat muskamlah. Saran dan

masukannya sifatnya kita ajukan kemasyarakat lebih banyak masyarakat itu menerima sifatnya pembangunan dan lain sebagainya itu real untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah kampung menyampaikan saran dan masukan berdasarkan usulan pembangunan kita tadi. Keterlibatan masyarakat itu sangat antusias namun kita setia mengajukan perwakilan melalui lembaga RT/RK mewakili masyarakat. Kalau masalah pembangunan itu kita libatkan masyarakat gitu, sebab pembangunan berorientasi kepada kepentingan masyarakat jadi tetap kita lihatkan masyarakat, namun mungkin melalui perwakilan karna sifat masyarakat kitokan tak bisa bahwa semua karna sibuk kerjaan gitu.”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk partisipatif khususnya masyarakat tentang keuangan desa dikampung sengkemang penulis sepakat bahwa untuk indikator partisipatif tentang keuangan desa di kampung sengkemang dikategorikan cukup baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan penghulu kampung, kerani dan bendahara kampung dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator partisipatif dalam penelitian evaluasi pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung sengkemang kecamatan koto gasib kabupaten siak berada pada kategori penilaian “cukup baik” dengan jumlah rata-rata 16 (61%). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34%-66% masuk kategori cukup baik.

4. Tertib Dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran merupakan kesesuaian penggunaan anggaran dengan alokasi dana atau anggaran yang telah ditemukan sebelumnya. Sedangkan anggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam pengelolaan anggaran dana desa.

Tertib dan disiplin anggaran dalam penelitian ini harus pengelolaan dana harus taat hukum, harus tepat waktu, harus tepat jumlah, harus sesuai dengan prosedur yang ada dan pengeluaran keuangan desa melalui bendahara desa di Kampung Sengkemnag kecamatan koto gasib kabupaten siak.

berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa tertib dan disiplin anggaran ialah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Maka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penggunaan anggaran dalam pengelolaan anggaran keuangan desa di Kampung Sengkemng dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Tertib dan Disiplin Anggaran Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bidang Pembangunan Di Kampung Sengkemang Kabupaten Siak

| No | Item yang dinilai | Kategori penilaian | | | jumlah |
|----|---|--------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup baik | Kurang baik | |
| 1 | Realisasi anggaran pengelolaan sesuai RAB dan LPJ | 8 | 17 | 1 | 26 |
| 2 | Pelaksanaan sesuai dengan aturan | 8 | 17 | 1 | 26 |
| | Jumlah | 16 | 34 | 2 | 52 |
| | Rata-rata | 8 | 17 | 1 | 26 |
| | Presentase | 31% | 65% | 4% | 100% |

Sumber : data olahan peneliti 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa mengenai pengelolaan keuangan desa pada indicator tertib dan disiplin anggaran tentang keuangan desa yang menjawab baik berjumlah 16 responden dengan rata-rata 8 dan presentase 31% , Cukup baik berjumlah 34 responden dengan rata-rata 17 dan presentase 65% dan kurang baik berjumlah 2 responden dengan rata rata 1 dan presentse 4%.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai tertib dan disiplin anggaran, maka dapat dijelaskan seperti berikut :

a. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran merupakan laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang undangan.

Realisasi anggaran menunjukkan perbandingan anggaran dan realisasinya, yang mana ini perlu diawasi secara baik dan benar. Karena jika terjadi perbedaan anggaran dan realisasi maka akan timbul kecurigaan dari masyarakat pelaksana anggaran mengenai pengelolaan keuangan desa terhadap pemerintah desa.

Pada item penilaian realisasi anggaran untuk kategori baik, peneliti mendapatkan jawaban sebanyak 8 orang responden dengan alasan karena sebelumnya sudah dimusyawarahkan jadi didalam realisasinya tinggal membuat administrasinya. Dan mendapatkan 17 orang resonden untuk ketegori cukup baik dengan alasan sesuai dengan rencana anggaran yang ada dan di sesuai kan dengan keadaan saat itu. Dan sedangkan untuk kategori kurang baik peneliti mendapatkan jawaban 1 responden dengan alasan ada pembangunan yang tidak terealisasi seperti seminisasi jalan suak miam, pembangunan box culvert rt 4.

Hasil wawancara penulis dengan bapak Fauzi selaku Kerani Kampung Sengkemang yang mengatakan :

“kalau tertulis secacra detail itu dari masyarakat satu per satu itu tidak ada. Tapi umumnya itu setiap rapat disampaikan dan juga di kantor kampung itu sudah dibuat realisasi apa yang terealisasi pada tahun bersangkutan”
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ibu

Azura Andani selaku Bendahara kampung Sengkemang yang mengatakan :

“untuk realisasi anggaran terutama soal RAB dan LPJ memang kadang ada selisih. Untuk realisasi anggaran

tahun 2020 ini kebanyakan dana yang untuk pembangunan dialihkan ke covid”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa realisasi anggaran keuangan desa sengkemang cukup baik karena sesuai dengan RAB dan LPJ yang ada.

b. Penerapan aturan yang berlaku

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa harus mengacu ada aturan atau pedoman yang melandasi, seperti penerapan asas serta prinsip-prinsip dalam pengelolaan dana desa.

Pada item penilaian penerapan aturan yang berlaku untuk kategori baik, peneliti mendapatkan jawaban sebanyak 8 orang responden dengan alasan karena didalam keuangan desa selalumelibatkan yang berkepentingan dibidangnya baik pemerintahan kampung baik pendaming keuangan yang terkait. Dan mendapatkan 17 orang responden untuk ketegori cukup baik dengan alasan dalam rapat sudah dijelaskan ril-ril mana yang dipergunakan dan yang mengetahui lebih jelasnya adalah orang yang terkait saja. Dan sedangkan untuk kategori kurang baik peneliti mendapatkan jawaban 1 responden dengan alasan hanya mengikuti arahan dari yang diatas biasanya namun masi kurang paham dengan detail-detail dari aturan mengenai pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Fauzi selaku Kerani Kampung Sengkemang yang mengatakan :

“insha allah selalu sesuai. Sesuai dengan peraturan dalam keuangan yang masuk itu selalu dengan tepat waktu dan karna kita didalam laporan keuangan itu selalu melaksanakan apa yang diarahkan dari pada pendamping baik pendamping keuangan dan lainnya”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ibu Azura Andani selaku Bendahara Kampung Sengkemang yang mengatakan :

“untuk pengelolaan keuangan desa ini menurut kami sudah sesuai peraturan yang ada. Karena kami apapun yang terjadi kami ikuti alur prosedurnya. Karena kami tidak mau bermasalah dengan desa ini, untuk keuangan desa sifatnya resmi selalu menekankan kepada perangkat desa, Alhamdulillah selama saya menjabat teat waktu terus dalam membuat APBDes”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah sesuai aturan yang berlaku.

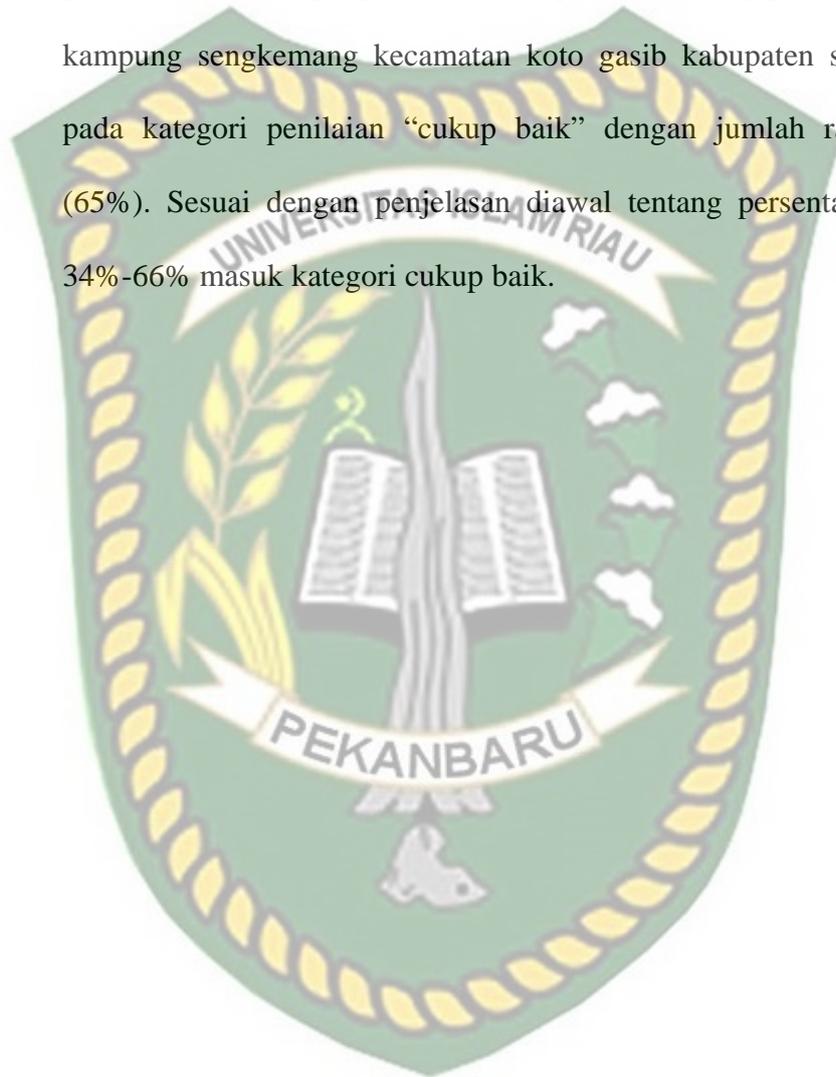
Berdasarkan hasil wawancara bapak penghulu kampung sengkemang yang telah peneliti lakukan di lapangan, beliau mengatakan :

“Iya sesuai, meski harus sesuai, kalau tidak nanti kito yang kena gitu. Aturan-aturan nyo kito tetap melalui aturan baik merujuk dari presiden dan menteri maupun dari pemerintah daerah.”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk tertib dan disiplin anggaran tentang keuangan desa dikampung sengkemang penulis sepakat bahwa untuk indicator tertib dan disiplin anggaran tentang keuangan desa di kampung sengkemang dikategorikan cukup baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan penghulu kampung, kerani dan

bendahara kampung dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator tertib dan disiplin anggaran dalam penelitian evaluasi pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung sengkemang kecamatan koto gasib kabupaten siak berada pada kategori penilaian “cukup baik” dengan jumlah rata-rata 17 (65%). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34%-66% masuk kategori cukup baik.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

C. Rekapitulasi dari indikator-indikator pengelolaan Keuangan desa bidang pembangunan di kampung Sengkemang kecamatan koto gasib kabupaten siak

Dari semua hasil penjelasan responden dalam pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung sengkemang kecamatan koto gasib kabupaten siak diatas maka dapat kita lihat rekapulasi keseluruhan jawaban dari responden, untuk mengetahui dikategorikan mana pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung sengkemang kecamatan koto gasib kabupaten siak dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel V.8 : rekapitulasi Tanggapan Responden Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bidang Pembangunan Di Kampung Sengkemang Kabupaten Siak

| No | Item yang dinilai | Kategori penilaian | | | jumlah |
|------------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup baik | Kurang baik | |
| 1 | Transparasi | 16 | 8 | 2 | 26 |
| 2 | Akuntabilitas | 14 | 10 | 2 | 26 |
| 3 | Partisipatif | 16 | 8 | 2 | 26 |
| 4 | Tertib dan disiplin anggaran | 8 | 17 | 1 | 26 |
| Jumlah | | 54 | 43 | 7 | 104 |
| Presentase | | 52% | 41% | 7% | 100% |
| Skala pengukuran | | 34-66% | | | |
| Kriteria | | Cukup baik | | | |

Sumber : data olahan peneliti 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kamung sengkemang kecamatan koto gasib kabupaten siak dapat dikategorikan baik dengan jumlah responden 54 orang atau 52% berada pada kategori baik. Dan responden yang mengatakan cukup bika ada sebanyak 43 orang atau 41%. Sedangkan yang mengatakan kurang baik ada 7 responden atau 7%.

Maka dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya pengelolaan keuangan desa di kampung sengkemang kecamatan koto gasib kabupaten siak dikatakan cukup baik, kesimpulan ini sesuai dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan bahwa yang dikatakan kategori “cukup baik” karena berada pada skor 33%-66% dengan kategori cukup baik. Dalam pelaksanaannya penggunaan keuangan desa telah terlaksana namun belum maksimal.

D. Faktor-faktor penghambat pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung sengkemang kecamatan koto gasib

Adapun factor-faktor penghambat keuangan desa bidang pembangunan, yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintahan desa soal musrembang yang membuat peserta yang hadir dalam musrembang desa kesannya hanya itu itu saja
2. Kurangnya pengalaman sumber daya manusia, dikarenakan latar belakang pendidikan perangkat desa pada umumnya lulusan SMA. Hal ini sangat berpengaruh kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Jaringan internet yang mereka miliki mengalami endala karena lokasi kantor desa berada di ujung desa, sehingga jaringan internet dikantor sangat sulit dijangkau.

Pemerintahan desa dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan adalah:

1. Pelatihan

Pelatihan dapat membantu perangkat desa dalam mengelola keuangan desa, perangkat desa dapat berkonsultasi dan bertanya secara langsung

terkait kesulitan yang dihadapinya. Dengan adanya pelatihan, perangkat desa dapat lebih paham, berkompeten dalam menjalankan tugasnya serta dapat mengimplementasikannya dalam pekerjaannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penggunaan keuangan desa selama ini telah berjalan secara efektif, walaupun pengalokasiannya belum efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung Sengkemang sudah cukup baik dalam perencanaan dan penganggaran serta penyelenggaraannya. Dari hasil penelitian yang memiliki 4 indikator penilaian rata-rata menjawab cukup baik dan responden sebanyak 26 orang.

Pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa ini melalui baliho dan dilakukan secara langsung dengan membacakan laporan pertanggungjawaban disaat adanya musyawarah-musyawarah desa.

Selain itu penelitian menemukan ada beberapa hambatan pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan di kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak yaitu rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, sarana yang kurang memadai serta kurangnya komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Kepada penghulu kampung sengkemang dalam proses pembangunan hendaknya melibatkan seluruh lembaga-lembaga yang ada di desa dan mengedepankan musyawarah dalam memperoleh hasil mufakat, melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh masyarakat desa dan menampung aspirasi masyarakat desa untuk menentukan prioritas pembangunan desa
2. Kepada Badan Permusyawaratan Kampung Sengkemang selaku lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, hendaknya meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan melakukan emantauan secara berskala. Diperlukannya peningkatan kerja dalam pengawasan keuangan desa dari Badan ermusyawaratan kampung sengkemang yaitu lebih aktif dalam melakukan pengawasan embangunan sesuai prioritas; meningkatkan perannya dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan serta evaluasi hasil desa kepada masyarakat pembangunan untuk transparasi dan akuntabel pengelolaan dana.
3. Kepada masyarakat kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak agar dapat meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa seta pengelolaan keuangan desa terutama di bidang pembangunan.

4. Harus ada sosialisasi secara terbuka yang dilakukan pemerintah desa untuk masyarakat desa agar masyarakat mengetahui pengalokasian dan penggunaan dana desa yang akan atau sudah dikelola untuk pembangunan desa, serta agar masyarakat juga berperan aktif dalam pembangunan desa.
5. Kepada seluruh pemerintah desa dan masyarakat untuk saling bekerja sama dan menjaga komunikasi yang baik agar kamung sengkemang bisa semakin maju dan berkembang dalam segala bidangnya
6. Ditingkatkannya sumber daya manusia aparatur desa agar dapat melakukan tugas, fungsi, dan kewajibannya dengan baik melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan
7. Untuk seluruh warga setempat agar lebih amanat lagi dan meningkatkan kemajuan desa bersama
8. Masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak mengetahui penggunaan dana desa, sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan keinginan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. (2020). evaluasi pengelolaan keuangan desa di desa timbuseng kecamatan pattallassang kabupaten gowa. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 2(2), 72-81.
- BEMPAH, H. (2016). evaluasi pengelolaan keuangan desa di desa ayuhulalo kecamatan tilamuta kabupaten boalemo. *Skripsi*, 1(921412186).
- Chairun, A. (2018). *evaluasi pengelolaan keuangan desa (studi kasus pengelolaan keuangan desa pada desa di kota pariaman)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Fahrizal, M. G. (2018). Evaluasi Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungmaling dan Desa Kunitir Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6(1), 1-7.
- Ferarrow, N., & Suprihanto, J. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 64-69.
- Hasrina, Y. (2015). Analisis Pengelolaan Keuangan Rural Infrastructure Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Risâ€™pnpm) di Organisasi Masyarakat Setempat (Oms) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 13(4), 475-486.
- Husna, H. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kasus Penggunaan Dana Desa di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. *JOSETA: Journal of Socio-economics on Tropical Agriculture*, 1(1).
- Iriawan Maksudi beddy, 2017. *Dasar-dasar administrasi public*. Depok: Rajawali
- P. Siagian Sondang, 2003. *Filsafat administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rulyanti, D., Sularso, R. A., & Sayekti, Y. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11(3), 323-335.
- Sugiono, 2017. *Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode pnelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. bandung: penerbit alfabeta

Sugiyono, 2012. *Metode penelitian Administratif*. Bandung: Penerbit alfabeta.

SUHENDRA, A. (2018). *evaluasi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa di desa sadangmekar kecamatan cisarua kabupaten bandung barat provinsi jawa barat* (Doctoral dissertation, IPDN).

Surya, K., Thomas, Y., & Genjik, B. (2013). Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 2(7).

SUSILAWATI, S. *evaluasi pengelolaan keuangan desa di desa tapong kecamatan maiwa*.

Suyatna, R. (2021). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Provinsi Banten (Studi Kasus Kabupaten Serang). *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 3(1).

Wibowo, G. A. (2014). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri). *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 13(3), 313-325.

Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: penerbit andi

Zulkifli Dkk, 2013. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa*. FISIPOL UIR Pekanbaru

REGULASI :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 1 ayat 6

DOKUMENTASI/WAWANCARA :

Data yang menjadi fenomena adalah wawancara dengan orang yang ditempat penelitian.